

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK
(STUDI PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

BALQIS GHASSANI IRIYANTO PUTRI

NIM : I91218066

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini, saya :

Nama : Balqis Ghassani Iriyanto Putri
NIM : I91218066
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik
(Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan
Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang menyatakan



Balqis Ghassani Iriyanto Putri

NIM. I91218066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Balqis Ghassani Iriyanto Putri

NIM : I91218066

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul : **“Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing



Holilah, S.Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Balqis Ghassani Iriyanto Putri dengan judul : **“Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Januari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Holilah, S.Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

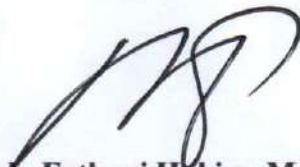
Penguji II



Noor/Rohman, M.A

NIP. 198510192015031001

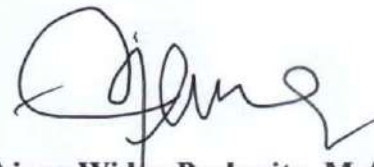
Penguji III



Moh. Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Balqis Ghassani Iriyanto Putri
NIM : I91218066
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
E-mail address : Balqisghassani0706@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang

Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis

(Balqis Ghassani Iriyanto Putri)

ABSTRAK

Balqis Ghassani Iriyanto Putri, 2023, **Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)**, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Partai Gerindra.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun kebijakan afirmatif telah hadir, namun pada praktiknya partisipasi dan keterwakilan perempuan di politik belum pernah mencapai target minimal keterwakilan sebesar 30 persen. Upaya konkrit lainnya dibutuhkan guna mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang politik terutama melalui partai politik. Sayangnya partai politik selama ini belum memiliki langkah berarti dan komitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Partai Gerindra khususnya di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu partai yang memperlihatkan perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Keberhasilan dalam mendudukkan perempuan di legislatif secara konsisten selama tiga kali penyelenggaraan pemilu yakni 2009, 2014 dan 2019 menjadi salah satu bukti bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo memiliki perhatian dan komitmen yang serius terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Teori Pemberdayaan dan Teori Perempuan dan Partai Politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menerapkan sepenuhnya teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Upaya pemberdayaan perempuan dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo kepada dua elemen yaitu perempuan kader partai dan perempuan umum atau masyarakat. Meskipun telah banyak upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, namun upaya tersebut cenderung masih belum maksimal atau “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah peran domestik, budaya patriarki, agama dan kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan. Strategi yang dijalankan untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan adalah memberikan keleluasaan waktu, mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan serta memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.

ABSTRACT

Balqis Ghassani Iriyanto Putri, 2023, **Empowering Women in Political Parties (Study on the Leadership Council of the Great Indonesia Movement Party Branch, Sidoarjo Regency)**, Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Empowerment, Women, Gerindra Party.

The underrepresentation of women in politics and their low engagement rates are the driving forces behind this study. Despite the existence of affirmative action programs, in reality, women's participation and representation in politics have never surpassed the minimum requirement of 30%. Empowering women in politics, especially through political parties, is one of the other tangible actions that are required to support women's participation in politics. Unfortunately, political parties have not yet taken serious steps to empower women in politics. The Gerindra Party, particularly in Sidoarjo Regency, is one of the political parties that is concerned with women's empowerment. The Gerindra Party in Sidoarjo Regency has constantly placed women in the legislature in three elections, specifically 2009, 2014, and 2019. This indicates the Gerindra Party's serious attention and dedication to strengthening women in politics.

This study intends to explain and characterize efforts to empower women in political parties in the DPC Gerindra Party, Sidoarjo Regency, as well as the issues that prevent it and the methods utilized to get beyond such barriers. The methodology in this study is qualitative. The methods of data collecting used are interviews and documentation. This study's data analysis methods followed the Miles and Huberman paradigm, which included data reduction, data presentation, and conclusion-drawing. The theories being applied are the theories of women and political parties and empowerment theory.

The study's findings demonstrate that the DPC Gerindra Party in Sidoarjo Regency's efforts to empower women properly implement Edi Suharto's 5P idea of empowerment. In Sidoarjo Regency, the DPC Gerindra Party works to advance women's empowerment for two groups: women party cadres and women generally. Despite the DPC Gerindra Party's various efforts to empower women in Sidoarjo Regency, these efforts are sometimes insufficient or "half-hearted" in expanding the role of women in politics. Domestic responsibilities, patriarchal society, religion, and a lack of political commitment are all barriers to women's empowerment. Offering time flexibility, encouraging women to participate actively in communal and religious activities, and giving women negotiating training are the strategies used to remove barriers to women's empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Pemberdayaan.....	21
2. Perempuan dan Partai Politik	29
3. Kebijakan <i>Affirmative Action</i>	33
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian	40

E. Tahap-Tahap Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Keabsahan Data.....	49
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Kabupaten Sidoarjo.....	51
2. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.....	59
B. Analisis dan Pembahasan.....	66
1. Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo	66
2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.....	112
3. Strategi Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo	120
BAB V : PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133
A. Pedoman Wawancara	133
B. Pedoman Dokumentasi	138
C. Transkrip Wawancara	139
D. Hasil Analisis Reduksi Data	181
E. Dokumentasi Penelitian	211
F. Jadwal Penelitian.....	213
G. Surat Izin Penelitian.....	214
H. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	218

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterwakilan Perempuan di Parlemen RI.....	1
Tabel 1. 2 Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif di Kab. Sidoarjo.....	6
Tabel 2. 1 Indikator Keberdayaan	28
Tabel 3. 1 Informan Penelitian DPC Partai Gerindra Sidoarjo	41
Tabel 3. 2 Informan Penelitian PC PIRA Sidoarjo.....	41
Tabel 3. 3 Informan Penelitian Tokoh Masyarakat	42
Tabel 4. 1 Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol pada Pemilu 2004	52
Tabel 4. 2 Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol pada Pemilu 2009	53
Tabel 4. 3 Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol pada Pemilu 2014	54
Tabel 4. 4 Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol pada Pemilu 2019	56
Tabel 4. 5 Susunan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo	63
Tabel 4. 6 Upaya Pemberdayaan Perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo	106
Tabel 4. 7 Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.....	119
Tabel 4. 8 Strategi Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo	125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kegiatan Pendidikan dan Sarasehan Politik.....	83
Gambar 4. 2 Program dan Kegiatan PC PIRA Kab. Sidoarjo	97



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya dapat menempati tempatnya masing-masing dalam kehidupan kemasyarakatan tanpa menjadi kurang hak-sama, karena pikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang setara antara perempuan dan laki-laki. Berbicara mengenai perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kedudukannya di dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan politik. Dalam konteks politik, perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, walaupun masalah peran dan kedudukan kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak asasi yang mana perempuan berhak untuk memilikinya.¹

Kondisi perpolitikan di Indonesia sampai saat ini, menunjukkan bahwa posisi dan peran perempuan dalam bidang politik masih temarginalkan.² Masyarakat dan publik pada umumnya juga belum memiliki keberpihakan terhadap keterlibatan perempuan dalam urusan politik. Hal ini dibuktikan dari masih minimnya kaum perempuan mengisi jabatan-jabatan publik yang strategis baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik terutama lembaga legislatif cenderung jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 1. 1
Keterwakilan Perempuan di Parlemen RI

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	9	3,8	236	96,2

¹ Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Politik Islam Volume 1 No. 1*, 2018, hal. 64-65

² Nalom Kurniawan, Keterwakilan Perempuan Didewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, *Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 4*, 2014, hal. 722

1955-1960	17	6,3	255	93,7
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,83	424	92,2
1977-1982	29	6,3	431	93,7
1982-1987	39	8,5	421	91,5
1987-1992	65	13,9	435	87,0
1992-1997	62	12,5	438	87,5
1997-1999	54	10,8	446	89,2
1999-2004	45	9,0	455	91,0
2004-2009	61	11,09	489	89,3
2009-2014	101	17,86	459	82,14
2014-2019	97	17,3	463	82,7
2019-2024	118	20,5	457	79,5

Sumber : dikutip dari Juniar Laraswanda Umagapi dalam *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan Dan Peluang*.³

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan terkait jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif dalam setiap pemilihan umum, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih cukup rendah. Dominasi budaya patriarki dan stereotipe terhadap kaum perempuan, merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar didalam kehidupan masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau inferior dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut mengakibatkan perempuan dibatasi ruang gerak hanya dalam wilayah domestik (rumah tangga) sehingga belum mampu menjalankan perannya di wilayah publik yang notabeneanya dianggap sebagai wilayah laki-laki (kepala keluarga).⁴

³ Juniar Laraswanda Umagapi, *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan Dan Peluang*, *Jurnal Kajian Vol. 25 No. 1*, 2020, hal. 24

⁴ Oktaviani Adhi Suciptaningsih, *Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal*, *Jurnal Komunitas 2 (2)*, 2010, hal. 68

Stereotipe terhadap kaum perempuan yang digambarkan sebagai seseorang yang lemah, emosional, pasif, submisif, luwes, tergantung, dan memerlukan perlindungan, menyebabkan perempuan dianggap tidak cocok untuk berpolitik, sebab politik merupakan dunia yang keras dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan yang mana jauh dari sifat feminim yang dilekatkan pada diri perempuan. Pada akhirnya perempuan dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki potensi dan kemampuan yang mumpuni untuk memutuskan persoalan-persoalan publik atau masyarakat.⁵

Kondisi tersebut tidak menguntungkan bahkan menyulitkan bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam dunia politik. Padahal berbicara mengenai keterlibatan seluruh warga negara tidak terkecuali perempuan di ranah politik, menjadi agenda yang penting dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.⁶ Penerimaan terhadap partisipasi dan perspektif perempuan dalam politik merupakan prasyarat pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.⁷ Sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia sesungguhnya telah berupaya untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat termasuk kaum perempuan mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama untuk dapat terlibat dan berperan di ranah politik melalui disahkannya peraturan perundang-undangan yang memihak kepada perempuan atau yang dikenal sebagai kebijakan afirmasi dengan menetapkan kuota minimal 30 persen keterwakilan politik perempuan.

Kebijakan afirmasi tersebut terdapat didalam Undang-Undang Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Undang-Undang Partai Politik yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut telah mengamanatkan kepada setiap partai politik untuk mengakomodir

⁵ St. Habibah, Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik, *Jurnal Al-Maiyyah Volume 8 No.2*, 2015, hal 355-356

⁶ Amirullah, Pendidikan Politik Perempuan, *Jurnal Visipena Volume 7 Nomor 1*, 2016, hal. 105

⁷ Jullie Ballington, *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat*, United Nations Development Programme And National Democratic Institute, 2011, hal.7

keterwakilan perempuan sebesar 30 persen baik dalam daftar pencalonan anggota legislatif, pendirian maupun kepengurusan partai politik.⁸ Meskipun berbagai upaya melalui kebijakan telah dibuat oleh Negara dalam rangka mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, namun pada praktiknya partisipasi perempuan dalam politik masih rendah dan bahkan belum pernah mencapai target minimal keterwakilan sebesar 30 persen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang termarginalkan di ranah politik.

Pada gilirannya, dibutuhkan upaya konkrit lainnya guna mendukung keterlibatan perempuan dalam politik dan mengatasi marginalisasi perempuan dalam politik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik terutama melalui partai politik. Pemberdayaan perempuan melalui partai politik merupakan langkah awal untuk meningkatkan partisipasi, kapasitas dan keterwakilan perempuan dalam politik.⁹ Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan salah satunya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Terkait dengan kelompok lemah atau tidak berdaya dalam kajian pemberdayaan, perempuan termasuk salah satu kelompok yang lemah atau tidak berdaya secara struktural yakni kelompok yang tidak berdaya secara gender atau karena mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek kehidupan tertentu salah satunya politik.¹⁰

Dominasi budaya patrarki dan stereotipe terhadap kaum perempuan dalam kaitannya dengan politik merupakan wujud nyata dari ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan perempuan kurang berdaya untuk mampu berkiprah di dunia politik. Akibatnya, kaum perempuan lebih banyak

⁸ Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Makalah yang disampaikan dalam diskusi panel peluang untuk keterwakilan perempuan pada 2 Februari 2010, hal. 2-3

⁹ Nurman, *Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan*, *Journal Of Moral And Civic Education*, Vo. 1, No.2, 2017, hal. 63

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hal. 58-61

menjalankan peran sebagai objek dibandingkan sebagai subjek dalam kehidupan politik. Hal tersebut berdampak pada kaum perempuan sebagai salah satu kelompok di dalam masyarakat yang sampai saat ini masih mengalami banyak ketertinggalan atau keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan berbagai bidang lainnya. Untuk itu, melalui pemberdayaan di bidang politik diharapkan dapat memperkuat atau memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan sehingga nantinya mampu merubah dan memperbaiki posisi dan kondisi mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

Partai politik merupakan salah satu aktor utama dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan wadah bagi seluruh warga Negara termasuk kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Partai politik menjadi kunci partisipasi perempuan di bidang politik karena hanya partai satu-satunya institusi politik yang mampu merekrut dan memilih calon untuk pemilihan serta menentukan agenda kebijakan suatu negara. Bagaimana partai politik memupuk dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik merupakan prospek utama pemberdayaan politik perempuan.¹¹ Melalui partai politik, kaum perempuan dapat turut serta dalam dunia politik, meraih jabatan politik dan dapat secara nyata memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya di segala bidang khususnya bidang politik.

Sayangnya realitas yang ada selama ini menunjukkan bahwa partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi pada umumnya belum benar-benar memiliki komitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Bahkan selama ini belum ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen partai dalam pemberdayaan politik perempuan.¹² Fenomena dimana partai politik selalu merasa kekurangan kader perempuan untuk direkrut menjadi calon anggota legislatif karena alasan rendahnya minat dan kualitas

¹¹ Jullie Ballington, *op.cit*, hal. 8

¹² Siti Nurul Hidayah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik", <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, (diakses pada 7 Oktober 2021 pukul 15.00)

perempuan, “perilaku asal comot” yang sangat sering mewarnai pencalonan anggota legislatif terutama anggota legislatif perempuan serta masih minimnya perempuan duduk di lembaga-lembaga politik yang strategis menjadi suatu indikasi belum serius dan optimalnya partai dalam memberdayakan perempuan di bidang politik.¹³

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menjadi salah satu partai politik yang memperlihatkan perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang memiliki indeks prestasi keterwakilan perempuan yang cukup baik di tingkat nasional yakni DPR RI selama tiga kali penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yakni pemilu 2009, 2014 dan 2019.¹⁴ Sementara di tingkat lokal khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang mana terkait dengan partisipasi politik perempuan dapat dikatakan masih cukup rendah yaitu berdasarkan hasil pemilu 2019 hanya terdapat 8 orang perempuan (16 persen) yang berhasil duduk di lembaga legislatif, Partai Gerindra menjadi salah satu partai politik yang mampu secara konsisten dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan selama tiga kali penyelenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2

Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif di Kab. Sidoarjo

Partai Politik	Tahun Pemilu		
	2009	2014	2019
Gerindra	1	1	2
PKB	1	1	2
Golkar	-	1	-
Demokrat	3	3	-
Nasdem	-	-	1

¹³ Nurman, *op.cit*, hal.63-64

¹⁴ Cakra Wikara Indonesia, Dinamika Keterwakilan Perempuan Di Parlemen : Membaca Data Dan Proyeksi Ke Depan Dalam Rapat Umum Kaukus Perempuan Parlemen RI pada 17 Februari 2020, <http://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/02/PPT-CWI-KPP-RI-17-Feb-2020.pdf>, (diakses pada 10 Oktober 2021 puku 10.00)

PPP	-	1	1
PKS	-	-	1
PAN	1	-	-
PDIP	-	-	1
PKNU	1	-	-
Jumlah	7 orang (14%)	7 orang (14%)	8 orang (16%)

Sumber : diolah oleh penulis dari website KPU Sidoarjo.¹⁵

Dari data diatas menunjukkan bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang secara konsisten mampu mendudukan kader perempuannya di lembaga legislatif, bahkan terdapat peningkatan jumlah keterwakilan kader perempuan pada pemilu 2019 walaupun belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra khususnya di Kabupaten Sidoarjo memiliki perhatian dan komitmen yang serius dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengetahui pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo?

¹⁵ KPU Kabupaten Sidoarjo, <https://kpu-dsidoarjo.go.id/pages/calon-terpilih-hasil-pemilu-pilkada-kpu-sidoarjo>, (diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 13.00)

2. Apa faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo?
3. Apa strategi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik khususnya yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terkait upaya yang dapat dilakukan dalam memberdayakan perempuan di bidang politik khususnya oleh partai politik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang politik bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.

E. Definisi Konseptual

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok yang lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan salah satunya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁶

2. Perempuan

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang lemah atau tidak berdaya secara struktural yakni kelompok yang tidak berdaya secara gender atau karena mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu salah satunya politik.¹⁷

3. Partai Politik

Partai politik menjadi kunci partisipasi perempuan di bidang politik karena hanya partai satu-satunya institusi politik yang mampu merekrut dan memilih calon untuk pemilihan serta menentukan agenda kebijakan suatu negara. Bagaimana partai politik memupuk dan mendorong

¹⁶ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 58

¹⁷ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 61

keterlibatan perempuan dalam politik merupakan prospek utama pemberdayaan politik perempuan.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dalam partai politik dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat perempuan di bidang politik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis serta mempermudah dalam memahami pembahasan yang ada pada skripsi ini maka dibuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan penelitian sebelumnya yakni hasil penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang saat ini dilakukan. Pada bab ini juga memuat uraian tentang teori pemberdayaan dan teori perempuan dan partai politik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dan konsep kebijakan *affirmative action*.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah penyajian dan analisis data. Pada bagian awal bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni

¹⁸ Jullie Ballington, *op.cit*, hal. 8

Kabupaten Sidoarjo dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan terkait hasil penelitian mengenai upaya pemberdayaan perempuan, faktor penghambat pemberdayaan dan strategi mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dipaparkan untuk menjawab masalah penelitian, sedangkan saran berisi tentang rekomendasi terkait hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berguna untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan, bahan analisis dan mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan.¹⁹ Berikut hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurman dengan judul “Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan”. Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh PKS Kota Padang. Teori yang digunakan adalah konsep pemberdayaan, konsep rekrutmen dan kaderisasi politik.²⁰ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam rangka memberdayakan perempuan dalam politik telah menerapkan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang netral gender yaitu tidak membedakan antara pemberdayaan terhadap kader perempuan dan laki-laki.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurman dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada

¹⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Pontianak : Alfabeta, 2015), hal.92

²⁰ Nurman, *op.cit.*

pemberdayaan yang dilakukan oleh partai politik dari sisi kebijakan saja. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Komang Eva Oktapiani, Bandiyah, dan Mirah Mahaswari dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat Dan PSI)”. Penelitian ini berfokus untuk melihat bentuk pemberdayaan perempuan pada 3 partai politik yaitu Partai PDIP, Demokrat dan PSI. Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme liberal David Marsh dan Gerry Stoker.²¹ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya pemberdayaan perempuan dalam partai politik terdapat didalam 3 ruang lingkup yaitu didalam lingkup organisasi internal partai, lingkup pra pemilihan dan lingkup pasca pemilihan. Pada lingkup organisasi internal partai, ketiga partai politik memberdayakan perempuan melalui adanya kebijakan atau peraturan didalam AD/ART yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan, selain itu PDIP dan Partai Demokrat memiliki divisi perempuan. Pada ruang lingkup pra pemilihan, pemberdayaan perempuan baik pada PDIP, Partai Demokrat maupun PSI PDIP dilakukan dengan memberikan prioritas dan kemudahan kepada perempuan dalam proses rekrutmen. Pada ruang lingkup pasca pemilihan, pemberdayaan perempuan baik pada PDIP, Partai Demokrat dan PSI dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada kader perempuan yang terpilih maupun tidak terpilih dalam pemilihan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Komang Eva Oktapiani, Bandiyah, dan Mirah Mahaswari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan

²¹ Komang Eva Oktapiani, dkk, Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat, PSI), *Jurnal Ilmu Politik Vol. 1 No.1*, 2020.

di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto. Selain itu pada penelitian sebelumnya yang mana berangkat dari teori feminis liberal, pemberdayaan lebih diarahkan pada kemampuan partai politik dalam menempatkan posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Sementara dalam penelitian saat ini dengan menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto, pemberdayaan lebih diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk memperkuat perempuan agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Komara Saputra dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung)”. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPD Partai Demokrat Lampung terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep umum pemberdayaan.²² Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya pemberdayaan perempuan pada DPD Partai Demokrat Lampung berupa rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader dan memberikan dukungan administrasi. Faktor yang mendukung pemberdayaan adalah adanya dukungan dari organisasi-organisasi perempuan dan kekompakan diinternal partai, sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang politik, kurangnya minat perempuan untuk berpolitik, dan perempuan memiliki waktu yang lebih pendek dibandingkan laki-laki.

Perbedaan penelitian Komara Saputra dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh

²² Komara Saputra, Skripsi : “*Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung)*”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020).

DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Pemilu 2019. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Citra Restu Lestari dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara)”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bentuk-bentuk dan strategi pemberdayaan dalam meningkatkan kompetensi perempuan menuju parlemen serta untuk mengetahui fungsi partisipasi dan partisipasi perempuan menuju parlemen. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah konsep pemberdayaan dan konsep partisipasi.²³ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh DPD PKS Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kompetensi perempuan adalah pemberian pelatihan-pelatihan khusus seperti pelatihan *public speaking*, kepemimpinan, gerakan silaturahmi tokoh politikus, dan beberapa pelatihan khusus lainnya, sementara strategi pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesadaran terkait pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan kepada ibu-ibu perwira dan melakukan *door to door* ke masyarakat.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Citra Restu Lestari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo,

²³ Citra Restu Lestari, Skripsi : “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara)”, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam lingkup peningkatan kompetensi perempuan menuju parlemen. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Komariyah dengan judul “Gerakan Perempuan Partai Politik (Studi tentang Pemberdayaan Perempuan oleh Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan mengenai model pemberdayaan Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo dan mengenai pemberdayaan yang dilakukan Perempuan Bangsa dalam meningkatkan kualitas perempuan di legislatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep tipologi pemberdayaan dengan empat model pendekatan yaitu pendekatan penyuluhan, pendekatan pelatihan, pendekatan koperasi swadaya dan pendekatan pembangunan terpadu.²⁴ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya pemberdayaan pada Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo di bidang politik menggunakan model pendekatan pelatihan seperti diadakannya program-program keterampilan, workshop tentang perempuan dan anak, pelatihan entrepreneur, dan sekolah gender agar perempuan memiliki kemampuan berpolitik. Sementara untuk meningkatkan kualitas perempuan di legislatif, Perempuan Bangsa melakukan pelatihan seperti Pelatihan Kader Pertama (PKP) dan Pelatihan Kader Menengah (PKM), walaupun secara umum Perempuan Bangsa tidak memiliki program yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan kualitas kadernya di legislatif.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Komariyah dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan konsep yang digunakan. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya

²⁴ Nur Komariyah, Skripsi : “*Gerakan Perempuan Partai Politik (Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan Oleh Perempuan Bangsa Di Kabupaten Sidoarjo)*”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sekaligus organisasi sayap perempuan partai yakni PIRA (Perempuan Indonesia Raya), sedangkan penelitian Nur Komariyah berfokus pada pemberdayaan perempuan di lingkup organisasi sayap perempuan PKB yakni Perempuan Bangsa. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rifa Ufairah Ilyas dengan judul “Peran Lembaga Flower Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Banda Aceh Pasca Konflik”. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan peran LSM Flower dalam meningkatkan pemberdayaan politik perempuan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan politik perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori *civil society*.²⁵ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya lembaga Flower dalam meningkatkan pemberdayaan politik perempuan di Kota Banda Aceh menjalankan dua peranan yaitu peranan katalisasi perubahan sistem dan implementasi program pelayanan dengan memberikan penguatan pada kelompok perempuan melalui pendampingan, pendidikan politik, dukungan untuk perempuan, pelatihan serta advokasi. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masih tingginya budaya patriarki, minimnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Ufairah Ilyas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peranan LSM dalam pemberdayaan politik perempuan. Selain itu, teori yang

²⁵ Rifa Ufairah Ilyas, Skripsi : *Peran Lembaga Flower Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Banda Aceh Pasca Konflik*, (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2016).

digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Jajang Kurnia dengan judul “Peran Pimpinan Pusat Aisyah Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pandangan Aisyah terhadap peran politik perempuan dan kegiatan pemberdayaan politik perempuan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Aisyah di era reformasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi pemberdayaan (aras mikro, mezzo dan makro) dan model perencanaan program pemberdayaan Edi Suharto (Model rasional komprehensif, inkremental, pengamatan terpadu, dan transaksi). Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya organisasi Aisyah memiliki pandangan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk berperan di ranah publik dan partisipasi perempuan di politik tidak hanya pada lembaga politik formal namun juga pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Aisyah menggunakan 3 aras strategi pemberdayaan baik mikro, mezzo dan makro serta model perencanaan inkremental yaitu model perencanaan program tambahan berupa pemberian pendidikan politik, pelatihan, mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan, mengadakan seminar, workshop, pengajian, kajian, penerbitan buku-buku, dan kampanye.²⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jajang Kurnia dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peran organisasi perempuan Aisyah dalam pemberdayaan politik perempuan. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sama yakni menggunakan teori pemberdayaan milik Edi Suharto, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini berfokus pada teori

²⁶ Jajang Kurnia, Skripsi : “Peran Pimpinan Pusat Aisyah Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

pendekatan pemberdayaan 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan) dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Jein Hilda Palandung, Daud Liando, dan Stefanus Sampe dengan judul “Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan Sulistiyani.²⁷ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya pemberdayaan politik perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan oleh berbagai *stake holder* yaitu penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), menggunakan konsep keberlanjutan dan program-program pemberdayaan seperti pendidikan dan rekrutmen politik telah terintegrasi antara pemerintah daerah dengan para *stake holder* lainnya.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jein Hilda Palandung, dkk dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberdayaan politik perempuan dilingkup kabupaten dan melibatkan berbagai macam pihak yaitu penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saat ini adalah Teori Pemberdayaan 5P Edi Suharto dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto.

²⁷ Jein Hilda, dkk, Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1*, 2018.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Candra Sitorus dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang”. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan peran LSM dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh LSM.²⁸ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya peran KPI Kota Semarang dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan kemandirian serta menjadi motivator dan wadah bagi para perempuan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait cara berorganisasi dan berpolitik. Faktor yang mendukung program pemberdayaan perempuan KPI Kota Semarang adalah adanya kerja sama antara LSM dan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan serta dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, NGO, dan pihak-pihak lainnya, sedangkan faktor yang menghambat pemberdayaan adalah kurangnya kesadaran dan kemauan kaum perempuan untuk mengenal dunia politik dan menerapkan pengetahuan berorganisasi serta masih tingginya budaya patriarki di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Candra Sitorus dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik khususnya yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peranan LSM dalam pemberdayaan politik perempuan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Syahita Tri Ratu dengan judul “Strategi Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara) Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Lampung Utara”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui strategi LSM dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik

²⁸ Candra Sitorus, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang, *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol.4, No. 3, 2015.

perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi pemberdayaan Edi Suharto (aras mikro, mezzo dan makro), teori tahapan pemberdayaan (penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan) dan konsep penyadaran Paulo Ferire.²⁹ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasannya strategi pemberdayaan yang dijumpai Kepala Utara dalam pemberdayaan politik perempuan melalui beberapa strategi yaitu penyadaran, pendayaan, dan pengkapasitasan, dengan disertai strategi pendekatan Mezzo yaitu pendekatan kelompok untuk melakukan pemberdayaan di bidang politik perempuan. Strategi pemberdayaan tersebut dibidang sudah cukup baik untuk memberi wawasan mengenai politik kepada para perempuan di Kecamatan Kotabumi Selatan. Dilihat dari meningkatnya kesadaran para perempuan dalam menggunakan hak suara mereka dalam pemilu.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syahita Tri Ratu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan penulis saat ini berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sama yakni menggunakan teori pemberdayaan milik Edi Suharto, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini berfokus pada teori pendekatan pemberdayaan 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan) dan Teori Perempuan dan Partai Politik yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* secara konseptual berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Makna

²⁹ Syahita Tri Ratu, Skripsi : “Strategi Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepala Utara) Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Lampung Utara”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021)

pemberdayaan sebagai *power* atau kekuasaan berasal dari ide utama pemberdayaan itu sendiri yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang melakukan apa yang kita inginkan, sehingga dalam pemberdayaan terdapat pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memberdayakan dan ada pihak yang diberdayakan. Pemberdayaan merupakan sebuah cara atau proses untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah, tidak berdaya atau kurang beruntung.³⁰

Pemberdayaan menurut Parsons dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana individu atau kelompok menjadi cukup kuat untuk dapat berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Rappaport mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat diarahkan agar mampu berkuasa atas kehidupannya. Sementara menurut Swift dan Levin pemberdayaan menunjuk pada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.³¹

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan salah satunya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki “kelemahan” di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu individu atau kelompok yang berdaya, memiliki

³⁰ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 58

³¹ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 58-59

kekuasaan, kemampuan atau pengetahuan, mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial serta melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³²

Lebih lanjut menurut Ife, pemberdayaan sebagai kekuasaan dapat diartikan secara luas sebagai kemampuan suatu kelompok khususnya kelompok lemah atau tidak berdaya dalam berbagai hal meliputi (1) Pilihan-pilihan personal yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan seputar kehidupannya, (2) Pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan untuk menentukan kebutuhan yang sejalan dengan aspirasi dan keinginannya, (3) Ide atau gagasan yaitu kemampuan untuk mengekspresikan dan memberikan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan, (4) Lembaga-lembaga yaitu kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan sebagainya, (5) Sumber-sumber yaitu kemampuan untuk memobilisasi sumber formal, informal dan kemasyarakatan, dan kemampuan dalam kaitannya dengan proses ekonomi, pendidikan dan sosialisasi.³³ Kaitannya dengan penelitian ini, pemberdayaan yang di maksud adalah upaya memperkuat perempuan di bidang politik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

b. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Berkaitan dengan kelompok lemah atau tidak berdaya, menurut Suharto terdapat tiga kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau

³² Edi Suharto, *op.cit*, hal. 60

³³ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 59-61

tidak berdaya, yaitu : kelompok lemah secara struktural, khusus dan personal.³⁴

- 1) Kelompok lemah secara struktural yaitu kelompok yang lemah secara kelas (masyarakat dengan kelas sosial dan ekonomi yang rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas etnis).
- 2) Kelompok lemah secara khusus yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal yaitu kelompok yang lemah karena mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Secara lebih mendalam, Suharto menjelaskan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang mengalami ketidakberdayaan dalam suatu masyarakat. Perempuan seringkali kurang dihargai bahkan dicap sebagai orang yang lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan yang dialami oleh perempuan seringkali diakibatkan dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu termasuk dalam konteks ini aspek politik.³⁵ Dominasi budaya patriarki dan stereotipe terhadap kaum perempuan dalam kaitannya dengan politik merupakan wujud nyata dari ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk berkiprah didunia politik sehingga perempuan sampai saat ini masih menjadi kelompok yang termarginalkan dalam politik. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan di bidang politik penting untuk dilakukan guna memperkuat perempuan di bidang politik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto, dalam upaya memberdayakan seseorang atau suatu kelompok dan mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan

³⁴ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 60

³⁵ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 61

melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P, yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.³⁶

- 1) Pemungkinan. Pemberdayaan dalam pendekatan ini dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat atau kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat (termasuk perempuan) berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan. Pemberdayaan dalam pendekatan ini dilakukan dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat atau kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat (termasuk perempuan) dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Perlindungan. Pemberdayaan dalam pendekatan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil atau kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat (termasuk perempuan).
- 4) Penyokongan. Pemberdayaan dalam pendekatan ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat atau kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya didalam masyarakat (termasuk perempuan) mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan. Pemberdayaan dalam pendekatan ini dapat dilakukan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan.

Sedangkan, menurut Ginanjar Kartasasmita terdapat tiga aspek pokok yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan, yaitu :³⁷

- 1) *Enabling* atau penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Aspek

³⁶ Edi Suharto, *op.cit.*, hal. 67

³⁷ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung : UNPAD Press,2016), hal. 62

ini menekankan pada pengenalan bahwa sejatinya setiap manusia maupun setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dalam aspek ini dimaknai sebagai upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran mengenai potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut.

- 2) *Empowering* atau memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan masukan berupa bantuan dana, membangun prasarana, mengembangkan lembaga pendanaan, melakukan penelitian dan pemasaran serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat menjadikan masyarakat semakin berdaya.
- 3) *Protecting* atau melindungi masyarakat dengan cara memihak masyarakat yang lemah dalam rangka mencegah persaingan yang tidak seimbang. Aspek ini menekankan bahwa pemberdayaan dilakukan tidak untuk menjadikan masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pendekatan pemberdayaan 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokong dan Pemeliharaan) yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Teori tersebut dipilih karena dianggap memiliki banyak aspek yang dapat teliti sehingga mampu memberikan gambaran secara lebih utuh dan menyeluruh terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

d. Strategi Pemberdayaan

Menurut Parsons, pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua pemberdayaan dapat dilakukan melalui kolektivitas, sehingga pemberdayaan secara kolektif dalam hal

ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat juga dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi tersebut berkaitan dengan kolektivitas dimana mengaitkan klien atau pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Menurut Suharto, terdapat tiga strategi pemberdayaan yaitu strategi aras mikro, strategi aras mezzo dan strategi aras makro.³⁸

- 1) Strategi Aras Mikro. Dalam startegi ini, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*, dan sebagainya.
- 2) Strategi Aras Mezzo. Dalam strategi ini, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- 3) Strategi Aras Makro. Strategi ini disebut juga strategi sistem besar dimana dalam strategi ini sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti melalui perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, dan pengorganisasian.

e. Indikator Keberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan individu atau suatu kelompok yang menyangkut kemampuan dalam tiga aspek yaitu kemampuan dalam aspek ekonomi, kemampuan dalam aspek mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan dalam aspek kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan didalam atau *power within*, kekuasaan untuk atau *power to*, kekuasaan atas atau *power over* dan kekuasaan dengan atau *power with*.³⁹ Berikut ini indikator keberdayaan dalam aspek kemampuan kultural dan politis dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan.

³⁸ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 66-67

³⁹ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 64-65

Tabel 2. 1
Indikator Keberdayaan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan didalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Assertiveness</i> dan otonomi b. Keinginan untuk menghadap subordinasi gender termasuk budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik c. Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobilitas dan akses terhadap dunia luar b. Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan c. Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, serta kekuasaan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> a. Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya, kapasitas dan hak perempuan pada tingkat keluarga dan masyarakat b. Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, politik dan hukum
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis b. Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat c. Partisipasi daalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis dan hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

Sumber : dikutip dari Edi Suharto dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.⁴⁰

⁴⁰ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 65

2. Perempuan dan Partai Politik

Studi tentang kebijakan afirmasi gender mudah dan banyak ditemukan terutama yang dikaitkan dengan representasi perempuan di lembaga legislatif, sementara kajian tentang dampak kuota gender pada partai politik secara internal masih sedikit. Lebih jauh digambarkan oleh Lovenduski bahwa ada semacam paradoks dimana meskipun partai politik memegang peran kunci dalam produksi dan reproduksi “*gender effects in politics*”, justru partai politik merupakan variabel yang hilang karena minim dikaji secara mendalam dalam riset perempuan dan politik. Secara khusus dalam konteks Indonesia, kajian tentang pengalaman partai politik dan strategi gender digambarkan sebagai upaya “separuh hati” oleh Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina berdasarkan riset pengalaman tiga partai pemenang Pemilu 2009.⁴¹

Para akademisi politik berperspektif feminis menyatakan bahwa tujuan implisit masuknya para pendukung kesetaraan ke dalam partai politik adalah untuk memastikan terjadinya perubahan sikap, cara pandang, dan tindakan yang semakin responsif gender. Hal ini memberikan arti bahwa, keterlibatan perempuan (berperspektif gender) tidak sekedar masuk menjadi bagian dari partai politik demi kehadiran, tapi untuk dapat memengaruhi rangkaian kebijakan serta tata kelola internal organisasi partai yang setara dan inklusif. Dalam tataran ideal, mereka menyebutnya sebagai upaya “*feminizing parties’ programmes*” yang pada gilirannya berpotensi ikut mendorong perubahan pada pemerintahan.⁴²

Peran sentral partai politik tidak terbantahkan dalam konteks demokrasi elektoral karena keterwakilan politik perempuan secara langsung dipengaruhi oleh praktik-praktik seperti rekrutmen, kaderisasi dan berbagai praktik lainnya yang dilakukan oleh partai politik, baik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif maupun sebagai kader partai. Partai

⁴¹ Cakra Wikara Indonesia, *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*, (Jakarta : Cakra Wikara Indonesia, 2021), hal.7-8

⁴² Ibid, hal.8

seringkali berperan sebagai *gatekeepers* yang mengendalikan akses ke posisi-posisi penting dengan pengaruh politik signifikan. Partai juga berwenang menetapkan isu-isu apa yang dianggap prioritas dan mendesak secara politik. Partai merupakan saluran formal utama bagi warga masyarakat sipil untuk menyuarakan kepentingannya agar ikut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan politik.⁴³ Partai politik sebagai organisasi yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum diharapkan juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan.⁴⁴ Partai politik menjadi kunci partisipasi perempuan di bidang politik karena hanya partai satu-satunya institusi politik yang mampu merekrut dan memilih calon untuk pemilihan serta menentukan agenda kebijakan suatu negara. Bagaimana partai politik memupuk dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik merupakan prospek utama pemberdayaan politik perempuan.⁴⁵

Realitas yang ada hingga hari ini masih terus memperlihatkan adanya persoalan serius seperti *under representation* perempuan di ranah institusi politik formal, seperti partai politik, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, aparatur birokrasi, dan kepala daerah. Mempersoalkan representasi perempuan di ranah institusi politik formal bukan sekedar urusan jumlah, melainkan juga substansi yang dibawa oleh para perempuan di institusi-institusi tersebut sehingga arah kebijakan, program, bahkan anggaran yang disusun tidak abai terhadap kekhasan pengalaman dan kepentingan perempuan. Dengan demikian, politik tidak hanya menjadi urusan formal prosedural, tetapi betul-betul mampu menawarkan solusi bagi permasalahan riil dalam masyarakat, termasuk di dalamnya masalah yang dialami perempuan.⁴⁶

⁴³ Ibid,hal.8

⁴⁴ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta : Buku Kompas, 2005), hal.62

⁴⁵ Jullie Ballington, *op.cit*, hal. 8

⁴⁶ Cakra Wikara Indonesia, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, (Depok : Cakra Wikara Indonesia, 2018), hal.xviii

Persolan *under representation* perempuan di ranah institusi politik formal yang terjadi hingga hari ini salah satunya disebabkan oleh partai politik itu sendiri. Partai politik sendiri seringkali menjadi tantangan bagi arus politik perempuan. Salah satu hal yang menyebabkan adalah karena partai selama ini belum melihat perempuan sebagai aset yang strategis, selain sekedar untuk memenuhi ketentuan formal perundang-undangan, agar dapat berpartisipasi dalam pemilu.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan penggambaran dari Ani Widyani Soetjipto bahwa upaya partai politik selama ini cenderung “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Setidaknya terdapat 3 aspek yang menunjukkan upaya “separuh hati” partai politik dalam memajukan peran perempuan di politik tersebut.

Aspek pertama berkaitan dengan tidak adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam partai politik. Partai politik secara umum tidak memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan keadilan gender baik yang tercantum dalam dokumen formal maupun dalam praktek (informal). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan kebijakan sekaligus landasan legal formal partai politik untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun mengatur sepak terjangnya dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Berbagai ketetapan mengenai partai politik dan tata tertib umum yang mengatur partai dan anggota partai dalam melaksanakan kegiatannya tertuang didalam AD/ART. Sebagai pedoman dan pegangan partai beserta anggotanya maka AD/ART haruslah mencantumkan dengan jelas segala hal yang dianggap penting oleh partai yang bersangkutan. Karena mengatur segala sesuatu yang sifatnya umum maka pada AD/ART seharusnya tercantum isu penting yang berkenaan dengan hak dan kesempatan anggota, khususnya perempuan. Jika peran dan kesempatan perempuan hendak ditingkatkan maka AD/ART mestinya memasukkan isu ini di dalamnya.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hal. xxii

⁴⁸ Ani Widyani Soetjipto, *op.cit*, hal. 65

Namun dari AD/ART seluruh partai politik yang ada, tidak satu pun yang mencantumkan ketentuan tentang hak dan kesempatan perempuan. Tidak dicantumkannya hak dan kesempatan bagi perempuan secara eksplisit dalam berbagai aturan pokok partai menjadi salah satu alasan yang memungkinkan keterpinggiran peran perempuan dalam partai. Prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua anggota partai, perempuan dan laki-laki, pada praktiknya didefinisikan sangat bias dengan persepsi laki-laki. Mulai dari kriteria rekrutmen sampai mekanisme pengambilan keputusan. Berbagai aktivitas dan kebijakan program yang dilaksanakan terkesan memberikan kesempatan pada perempuan sebatas retorika politik saja alias janji-janji kosong. AD/ART sebagai aturan pokok partai politik merupakan kunci utama yang menentukan bisa atau tidaknya perempuan mendapatkan kesempatan secara legal formal untuk berpartisipasi secara adil dengan laki-laki. Budaya politik yang sangat didominasi oleh kepentingan laki-laki akan semakin mengakar karena partai politik tidak mencantumkan aturan yang lebih memungkinkan peningkatan peran politik perempuan dalam aturan dasar partai (AD/ART).⁴⁹

Aspek yang kedua yaitu penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepemimpinan partai. Jabatan maupun bidang yang diduduki oleh perempuan dalam struktur kepemimpinan penting untuk dicermati karena dapat memetakan distribusi kader perempuan di partai politik. Meskipun secara umum persentase pengurus perempuan mengalami kenaikan, tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan mayoritas perempuan yang tidak menduduki posisi strategis. Jumlah perempuan dalam jabatan yang strategis partai politik masih minim. Hal tersebut akan berdampak pada minim dan sulitnya akses bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan di partai politik dan penganggaran. Kondisi ini akan membuat pengurus perempuan sulit mendapatkan ruang untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan partai dalam meningkatkan kesetaraan gender di ruang publik. Hal ini dikarenakan berdasarkan temuan dari berbagai riset sebelumnya, partai

⁴⁹ Ani Widyani Soetjipto, *op.cit*, hal. 66-67

politik menunjukkan salah satu karakter yang muncul yaitu dominannya ketua atau elit partai politik dalam mengambil keputusan internal partai. Dominannya ketua atau elit partai politik dalam pengambilan keputusan akan menutup ruang keterlibatan perempuan lebih jauh dalam kerja-kerja partai kecuali memiliki kedekatan dengan ketua atau elit partai politik.⁵⁰

Kesetaraan gender di partai politik masih dimaknai sebatas memenuhi amanat UU mengenai persentase minimal keterwakilan perempuan. Ini terbukti dengan jabatan perempuan di dalam kepengurusan parpol yang cenderung meningkat dengan penempatan di ranah yang tidak strategis. Hal ini menunjukkan bahwa meski jumlah kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai mengalami peningkatan secara teratur, tetapi representasi politik perempuan dalam kepengurusan parpol tidak secara otomatis menguat karena posisi-posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim diisi oleh perempuan.⁵¹

Aspek ketiga yaitu berkaitan dengan departemen perempuan dalam partai politik. Partai politik secara tradisional mengorganisasikan kader-kader perempuan dalam departemen perempuan yang sering digunakan hanya untuk mendukung kebijakan partai dan bertugas untuk pengumpul suara bagi partai politik dalam pemilu. Tugas yang dijalankan lebih banyak pada peran-peran tradisional yang sering dikaitkan dengan peran perempuan dibandingkan untuk memajukan peran perempuan di politik termasuk dalam partai politik. Isu gender masih dianggap sebagai urusan perempuan semata dan diberikan sepenuhnya oleh partai politik kepada departemen perempuan untuk mengurusnya.⁵²

3. Kebijakan *Affirmative Action*

Kebijakan *affirmative action* adalah tindakan sementara yang diambil oleh negara atau pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih

⁵⁰ Cakra Wikara Indonesia (2021), *op.cit*, hal. 23

⁵¹ Cakra Wikara Indonesia (2018), *op.cit*, hal. 132

⁵² Ani Widyani Soetjipto, *op.cit*, hal. 82

besar, dalam hal ini kepada perempuan untuk terlibat dalam politik formal. Kebijakan *affirmative action* di Indonesia diterapkan untuk mendorong lebih banyak perempuan duduk dalam jabatan-jabatan politik dan struktur politik seperti dalam partai politik, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ataupun birokrasi kementerian. Dasar penerapan kebijakan *affirmative action* adalah fakta adanya hubungan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dan oleh karena itu perempuan sering mengalami eksklusi dari proses politik formal. Kebijakan *affirmative action* dapat diterapkan dalam beragam bentuk, seperti pendidikan dan pelatihan politik serta penguatan kapasitas maupun target angka tertentu atau kuota yang harus dipenuhi untuk diisi perempuan.⁵³

Di Indonesia, kebijakan *affirmative action* melalui mekanisme target angka tertentu atau kuota untuk perempuan dalam politik ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Partai Politik, kebijakan *affirmative action* tersebut diatur dalam aturan yang berkaitan dengan hal kepengurusan, rekrutmen dan pendidikan politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik paling akhir yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai dinyatakan harus menyertakan minimal 30 persen perempuan. Kebijakan *affirmative action* juga diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum yang mana dalam Undang-Undang Pemilu terakhir yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 ditetapkan bahwa partai harus menyertakan 30 persen calon anggota legislatif perempuan dalam daftar calon dan menempatkan mereka minimal 1 dari 3 nama pada daftar tersebut. Ketika pertama kali diadopsi, kebijakan *affirmative action* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum masih bersifat himbauan dan tidak ada aturan sanksi jika dilanggar. Untuk itulah menjelang Pemilu 2009 dan 2014 selalu ada upaya untuk menguatkan aturan tersebut. Berikut ini dinamika kebijakan *affirmative action* terkait dengan penyelenggaraan pemilu:⁵⁴

⁵³ Cakra Wikara Indonesia (2018), *op.cit*, hal.55

⁵⁴ Ibid, hal.56

1) Pemilu 2004

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan **memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen.**

2) Pemilu 2009

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon yang diajukan parpol **memuat 30 persen perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon.**

3) Pemilu 2014

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 (ketentuan yang sama dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008), **diperkuat dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2013** yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU harus dilakukan di setiap dapil.

4) Pemilu 2019

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012).

Kebijakan *affirmative action* melalui mekanisme target angka tertentu atau kuota untuk perempuan dalam politik dalam Undang-Undang Partai Politik juga mengalami penguatan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang ini sudah terdapat pasal afirmatif untuk perempuan dalam kepengurusan parpol, tetapi belum diatur dengan detail dan sifatnya masih himbuan. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Menjelang Pemilu 2009, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini, pasal afirmatif telah diperkuat dengan mengatur lebih rinci tentang komposisi perempuan dalam kepengurusan serta menyertakan perempuan dalam pendirian dan pembentukan parpol.

Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang parpol sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pasal afirmatif dalam undang-undang ini diperkuat lagi dengan menambahkan pasal rekrutmen anggota DPR dan DPRD dengan mempertimbangkan 30 persen keterwakilan perempuan. Undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu hanya memuat pasal-pasal yang mengalami perubahan dari undang-undang sebelumnya. Berikut ini rincian pasal-pasal afirmatif pada tiga undang-undang partai politik :⁵⁵

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

- Pasal 13 Ayat 3: “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- Pasal 2 Ayat 2: “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”.
- Pasal 2 Ayat 5: “Kepengurusan parpol tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
- Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁵⁵ Ibid, hal.110

- Pasal 2 Ayat 1b Butir 2: “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”
- Pasal 2 Ayat 5: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”
- Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.
- Pasal 29 Ayat 1A: “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

Dari uraian data di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi penguatan pasal afirmatif pada Undang-Undang Partai Politik untuk peningkatan representasi perempuan di dalam struktur partai politik. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, secara gamblang dirumuskan aturan afirmatif dalam proses rekrutmen caleg agar mengutamakan seleksi kader parpol dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Demikian pula halnya dengan pendirian parpol. Sejak tahun 2008 berlaku peraturan yang mewajibkan parpol baru menyertakan 30 persen perempuan sebagai pendiri. Secara legal formal hal ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis meningkatkan representasi perempuan dalam kepengurusan partai politik.⁵⁶

⁵⁶ Ibid, hal.111

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Lexy J Moleong dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi berupa kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁷ Sedangkan penelitian deskriptif menurut Nazir merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁸ Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek atau tempat untuk diadakan suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian sesuai dengan judul yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

- a) Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang secara konsisten mampu mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif selama 3 kali penyelenggaraan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2015), hal.15

⁵⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal.54

pemilu legislatif yakni tahun 2009, 2014 dan 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dan upaya-upaya yang serius dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik.

- b) Selain Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai yang juga mampu mendudukkan kader perempuan selama 3 kali penyelenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Sidoarjo yakni tahun 2009, 2014 dan 2019. Namun kemampuan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif dikarenakan PKB merupakan partai politik dengan basis massa terbesar di Kabupaten Sidoarjo yakni warga NU. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo sebab Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik selain PKB sebagai partai besar di Kabupaten Sidoarjo yang mampu secara konsisten mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif.
- c) Lokasi penelitian tersebut dekat dengan domisili peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkau dan meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang akan dikaji.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam 16 (enam belas) bulan terhitung dari bulan Oktober 2021 s/d Januari 2023.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal.157

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data atau informasi kepada pengumpul data atau dengan kata lain data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.⁶⁰ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara secara langsung penulis dengan beberapa informan mengenai topik atau permasalahan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
- b) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
- c) Kader Perempuan Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
- d) Ketua Organisasi Sayap Perempuan Partai (PIRA) Kabupaten Sidoarjo
- e) Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi Sayap Perempuan Partai (PIRA) Kabupaten Sidoarjo
- f) Kader Organisasi Sayap Perempuan Partai (PIRA) Kabupaten Sidoarjo
- g) Tokoh Masyarakat

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer seperti buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu yang memiliki topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen maupun arsip DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), hal.193

⁶¹ Ibid.

selama proses penelitian.⁶² Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu seperti dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan atau mungkin paling menguasai sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek penelitian atau fenomena yang diteliti sehingga diharapkan nantinya data yang dihasilkan dapat berkualitas.⁶³

Sesuai dengan tujuan penelitian, pertimbangan penentuan informan didasarkan pada anggapan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang politik terutama yang dilakukan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo atau terlibat dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang dilakukan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Informan Penelitian DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

No	Nama	Jabatan
1	Moch. Sujayadi	Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
2	Roro Ira Darmayanti, S.H., M.Si	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
3	Novita Indriani	Kader Perempuan Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
4	Rochmania	

Sumber : diolah oleh Penulis

Tabel 3. 2
Informan Penelitian PC PIRA Kabupaten Sidoarjo

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Mimik Idayana	Ketua Pimpinan Cabang PIRA

⁶² Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations. Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hal. 61

⁶³ Sugiyono (2017), *op.cit*, hal. 96

		Kabupaten Sidoarjo
2	Erna Kusumawati	Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo
3	Anik Windiastri	Kader Pimpinan Anak Cabang PIRA Kabupaten Sidoarjo

Sumber : diolah oleh Penulis

Tabel 3. 3
Informan Penelitian Tokoh Masyarakat

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Dwi Astutik , S.Ag, M.Si	Dewan Pakar Muslimat NU Provinsi Jawa Timur
2	Bambang Teguh Budiono, S.KM	Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
3	Bambang Lukman, S.Sos	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Sumber : diolah oleh Penulis

E. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong, terdapat tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.⁶⁴

a. Tahap pra-lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan suatu tahapan dimana peneliti melakukan beberapa kegiatan sebelum melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Pada tahapan ini peneliti menyusun rancangan penelitian,

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 243

memilih lokasi penelitian, menyiapkan instrumen pengumpulan data (pedoman wawancara dan dokumentasi), mengurus perizinan penelitian sekaligus melakukan penjajakan ke lokasi penelitian (DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo) untuk mendiskusikan terkait rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik dengan pihak DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

b. Tahap lapangan

Tahap lapangan merupakan suatu tahapan dimana peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan proses wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi atau studi dokumen di lokasi penelitian.

c. Tahap analisis data

Tahapan yang selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif, mengolah data hingga melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah diperoleh pada tahap lapangan dengan mengacu pada teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan uji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan data guna memecahkan masalah penelitian.⁶⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

⁶⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 67

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu.⁶⁶ Secara umum terdapat 3 jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang menggabungkan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, sehingga wawancara dalam jenis ini dilakukan secara bebas namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu jauh menyimpang dari data yang diinginkan oleh peneliti.⁶⁷

Wawancara jenis ini tidak kaku namun lebih luwes dan fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Selain itu dalam proses wawancara, pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara ini digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat menggali permasalahan penelitian secara terbuka.⁶⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dimana mula-mula pewawancara menanyakan serangkaian pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam satu per satu dan mengorek keterangan lebih lanjut sehingga informasi (jawaban) yang diperoleh dapat mencakup semua variabel dengan lengkap dan mendalam.⁶⁹

Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, faktor penghambat pemberdayaan perempuan dan strategi mengatasi hambatan

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid, hal. 68

⁶⁸ Ibrahim, *op.cit*, hal. 92

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 270

dalam pemberdayaan perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Selain itu wawancara ini lebih fleksibel dan tidak kaku sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi secara mendalam namun tetap terarah dan sesuai dengan topik atau permasalahan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 unsur informan yaitu informan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, informan dari organisasi sayap perempuan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dan informan dari tokoh masyarakat. Selama melakukan proses wawancara di lapangan terutama dengan pihak partai, peneliti dibantu dan diarahkan oleh Bapak Amin yang juga merupakan pengurus partai. Informan pertama yang hendak peneliti temui untuk melakukan wawancara adalah ketua partai, namun karena padatnya jadwal kegiatan dari ketua partai kemudian peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara dengan sekretaris partai yakni Bapak Moch. Sujayadi. Wawancara pertama dengan sekretaris partai dilakukan pada 17 Mei 2022 bertempat di kantor fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, namun proses wawancara tidak berjalan hingga selesai dikarenakan adanya rapat fraksi sehingga peneliti diminta untuk melanjutkan wawancara pada 18 Mei 2022. Peneliti baru bisa menemui Sekretaris partai untuk melanjutkan wawancara pada 20 Mei 2022.

Informan kedua yang peneliti temui adalah ketua bidang pemberdayaan perempuan partai. Pelaksanaan proses wawancara peneliti dengan ketua bidang pemberdayaan perempuan partai berjalan lancar dan terselesaikan pada 20 Mei 2022. Informan selanjutnya yang ingin peneliti temui adalah kader perempuan partai, namun untuk menemui informan tersebut peneliti harus menunggu informasi dan rekomendasi dari Bapak Amin. Karena pengalaman peneliti yang harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi melalui Bapak Amin untuk melakukan wawancara kedua dengan sekretaris partai, peneliti memutuskan untuk menghubungi sendiri salah satu kader perempuan partai yakni Bu Rochmania yang peneliti temui ketika melakukan wawancara kedua dengan sekretaris partai. Ketika peneliti meminta ijin

dan kontak dari kader perempuan tersebut, pada awalnya beliau memberikan ijin dan meminta peneliti untuk menghubungi lagi terkait hari pelaksanaan proses wawancara, namun ketika peneliti hubungi, informan tersebut menolak untuk melakukan wawancara dengan peneliti. Oleh karena itu peneliti harus terus menghubungi Bapak Amin untuk diberikan rekomendasi kader perempuan partai yang bersedia untuk peneliti wawancarai.

Peneliti kemudian memutuskan untuk menemui informan dari organisasi sayap perempuan partai yakni Bu Mimik Idayana selaku Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo sambil menunggu konfirmasi dan rekomendasi dari Bapak Amin terkait informan kader perempuan partai. Karena peneliti pernah menemui Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo ketika pra penelitian dan telah mendapatkan kontak sekretaris PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dari Bapak Amin, peneliti dapat secara langsung menghubungi Bu Peny selaku sekretaris PC PIRA Kabupaten Sidoarjo untuk dijadwalkan bertemu dengan Bu Mimik Idayana untuk wawancara. Peneliti baru bisa bertemu untuk melakukan proses wawancara dengan ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo pada 25 Mei 2022.

Pada saat wawancara dengan ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo, peneliti meminta untuk diberikan rekomendasi dan kontak dari pengurus bidang pemberdayaan perempuan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dan kader PIRA, namun peneliti diarahkan untuk menghubungi kembali sekretaris PC PIRA Kabupaten Sidoarjo terkait kontak dari pengurus bidang pemberdayaan perempuan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dan kader PIRA. Oleh karena itu, selama proses menunggu informasi baik dari Bu Peny terkait pengurus bidang pemberdayaan perempuan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dan kader PIRA serta Bapak Amin terkait kader perempuan partai, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari tokoh masyarakat. Untuk wawancara dengan informan tokoh masyarakat dari Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, peneliti baru mendapatkan izin untuk melakukan wawancara pada 27 Mei 2022. Sementara wawancara dengan informan tokoh masyarakat dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo,

peneliti baru mendapatkan izin untuk melakukan wawancara pada 30 Mei 2022.

Peneliti kemudian menghubungi kembali sekretaris PC PIRA Kabupaten Sidoarjo terkait kontak dari pengurus bidang pemberdayaan perempuan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dan kader PIRA. Pada akhirnya peneliti mendapatkan kontak dari kedua informan tersebut pada 3 Juni 2022 dan pada tanggal tersebut juga peneliti dapat melakukan proses wawancara dengan kedua informan tersebut bertempat di warung kopi janoko bersamaan dengan kegiatan pertemuan organisasi sayap PIRA. Informan selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah kader perempuan partai. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Bapak Amin, peneliti baru bisa melakukan wawancara dengan seorang kader perempuan pada 17 Juni 2022, namun karena data yang didapatkan peneliti dari informan tersebut dirasa masih belum cukup, peneliti diberikan rekomendasi untuk menemui kader perempuan yang cukup senior di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yakni Bu Rochmania. Setelah peneliti hubungi, pada akhirnya Bu Rochmania bersedia untuk peneliti wawancarai dan proses wawancara terlaksana pada 20 Juni 2022. Setelah melakukan diskusi dan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing, untuk semakin melengkapi data yang ditemukan oleh peneliti khususnya dari unsur tokoh masyarakat, peneliti direkomendasikan untuk melakukan wawancara tambahan dengan tokoh perempuan politik yakni Bu Dwi Astutik, S.Ag, M.Si. Peneliti baru bisa melakukan proses wawancara dengan informan tersebut pada 16 Agustus 2022.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti arsip, buku, tulisan, angka, gambar dan dokumen-dokumen seperti laporan yang memuat data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berguna untuk mendukung dan memperkuat data dari hasil wawancara. Dokumentasi dalam penelitian

⁷⁰ Sugiyono (2015), *op.cit.*, hal.329

ini berupa dokumen-dokumen atau arsip DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan dan Biklen merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut model Miles dan Huberman, terdapat 3 (tiga) kegiatan atau aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷²

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, menyeleksi, memfokuskan pada hal-hal yang pokok atau penting dan mencari tema polanya. Kegiatan ini dilakukan karena data-data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu direduksi agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis selanjutnya.⁷³ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan aspek-aspek penting yang diteliti yaitu mengenai upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

b. Penyajian data

Kegiatan analisis yang selanjutnya yaitu penyajian data. Pada kegiatan ini, data-data yang telah diperoleh dan direduksi dapat tersusun dan terorganisasikan dalam pola berhubungan sehingga dapat memudahkan

⁷¹ Ibrahim, *op.cit*, hal.107

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : IKAPI, 2016), hal.247

⁷³ Ibid.

peneliti untuk memahami fenomena atau objek yang diteliti sekaligus dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya, namun yang paling sering digunakan berbentuk teks yang bersifat naratif.⁷⁴

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan data berdasarkan klasifikasi atau kategorisasi sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti sehingga dapat memudahkan dalam memahami tentang upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian naratif terkait bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengungkapkan makna data yang telah disajikan.⁷⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menyimpulkan data-data yang diperoleh di lapangan dan telah dianalisis melalui proses reduksi dan penyajian data dengan berpedoman pada kajian teori penelitian sehingga dapat mengungkapkan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah

⁷⁴ Ibid., hal.249

⁷⁵ Ibid.

dilakukan. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi 3 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁷⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁷ Untuk memastikan data yang diperoleh telah valid, penulis membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh dari masing-masing informan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁶ Ibid., hal.273

⁷⁷ Ibid.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Sidoarjo

a. Aspek Geografi

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota “Delta” karena letaknya yang berada diantara dua sungai besar yaitu sungai Surabaya dan sungai Porong. Kabupaten ini terletak di antara 7,3’-7,5’ lintang selatan dan 112,5’-112,9’ bujur timur. Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya di bagian utara, Selat Madura di bagian timur, Kabupaten Mojokerto di bagian barat dan Kabupaten Pasuruan di bagian selatan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 714.243 km². Kecamatan Jabon dan Kecamatan Sedati merupakan dua kecamatan terluas dimana masing-masing memiliki luas wilayah sebesar 11,34 persen dan 11,12 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sidoarjo, sementara Kecamatan Gedangan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni sebesar 3,37 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sidoarjo.⁷⁸

b. Aspek Demografi

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebesar 2,06 juta dimana 1,03 juta merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan dan 1,03 juta merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kecamatan Tarik memiliki jumlah penduduk sebesar 69.970, Kecamatan Prambon memiliki jumlah penduduk sebesar 80.959, Kecamatan Krembung memiliki jumlah penduduk sebesar 70.956, Kecamatan Porong

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2022*, (Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022), hal.62

memiliki jumlah penduduk sebesar 74.290, Kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk sebesar 57.183, Kecamatan Tanggulangin memiliki jumlah penduduk sebesar 91.119 , Kecamatan Candi memiliki jumlah penduduk sebesar 156.451, Kecamatan Tulangan memiliki jumlah penduduk sebesar 104.407, Kecamatan Wonoayu memiliki jumlah penduduk sebesar 87.278, Kecamatan Sukodono memiliki jumlah penduduk sebesar 124.734, Kecamatan Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebesar 204.441, Kecamatan Buduran memiliki jumlah penduduk sebesar 100.296, Kecamatan Sedati memiliki jumlah penduduk sebesar 98.246, Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk sebesar 201.920, Kecamatan Gedangan memiliki jumlah penduduk sebesar 121.501, Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk sebesar 209.510, Kecamatan Krian memiliki jumlah penduduk sebesar 134.051, dan Kecamatan Balong Bendo memiliki jumlah penduduk sebesar 76.856.⁷⁹ Dari data jumlah penduduk yang tersebar di 18 kecamatan dapat di ketahui bahwa Kecamatan Waru dan Taman merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Sidoarjo. Sementara Kecamatan Jabon merupakan kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Sidoarjo.

c. Aspek Sosial Politik

Konstelasi politik di Kabupaten Sidoarjo dapat diidentifikasi melalui partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebab pada setiap daerah suatu partai politik tertentu memiliki basis pemilih mayoritas. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1
Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol
pada Pemilu 2004

No	Nama Partai	Perolehan Kursi		
		P	LK	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	15	16

⁷⁹ Ibid, hal.51

2	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	-	8	8
3	Partai Demokrat	-	6	6
4	Partai Amanat Nasional	-	6	6
5	Partai Golongan Karya	-	6	6
6	Partai Keadilan Sejahtera	-	2	2
7	Partai Damai Sejahtera	-	1	1
Total kursi		1	44	45

Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Sidoarjo

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menjadi partai pemenang pada pemilu 2004 dengan memperoleh sebanyak 16 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan rincian yakni 1 kursi perempuan dan 15 kursi laki-laki. PKB juga menjadi satu-satunya partai politik yang mampu mendudukan kader perempuannya di legislatif. Dengan begitu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2004 sangat jauh dari harapan yakni hanya terdapat 1 orang perempuan yang berhasil lolos dan duduk di lembaga tersebut. Terkait konteks penelitian ini yaitu Partai Gerindra belum mendapatkan kursi sebab Partai Gerindra baru menjadi peserta pemilu pada penyelenggaraan pemilu 2009. Pada pemilu selanjutnya yakni pemilu 2009, posisi PKB sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Sidoarjo tergeser oleh Partai Demokrat seperti yang terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 4. 2
Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol
pada Pemilu 2009

No	Nama Partai	Perolehan Kursi		
		P	LK	Jumlah
1	Partai Demokrat	3	8	11
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	9	10
3	Partai Amanat Nasional	1	7	8
4	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	-	7	7
5	Partai Golongan Karya	-	4	4

6	Partai Keadilan Sejahtera	-	3	3
7	Partai Hati Nurani Rakyat	-	3	3
8	<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
9	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1	1	2
Total kursi		7	43	50

Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Sidoarjo

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu 2009 dengan memperoleh sebanyak 11 kursi. Walaupun begitu PKB tetap berada pada posisi atas yakni urutan kedua setelah Partai Demokrat dengan perolehan 10 kursi. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2009 ini mengalami peningkatan yang sangat baik dimana terdapat 7 orang (14 persen) perempuan yang berhasil lolos dan duduk di lembaga tersebut. Terdapat 5 partai politik yang berhasil mengantarkan wakil perempuan memperoleh kursi di legislatif pada pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat dengan perolehan terbanyak yakni 3 kursi dan 4 partai lainnya yakni PKB, PKNU, PAN dan Gerindra masing-masing 1 kursi. Terkait konteks penelitian ini yaitu Partai Gerindra, meskipun termasuk sebagai partai baru namun Partai Gerindra telah mampu memperoleh 2 kursi di legislatif bahkan 1 dari 2 kursi tersebut adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari awal Partai Gerindra memiliki perhatian dan komitmen yang serius terhadap keterlibatan perempuan di politik dan lembaga politik formal yaitu legislatif. Pada pemilu selanjutnya, Partai Gerindra mengalami peningkatan yang cukup pesat terkait perolehan kursi di legislatif. Hal ini terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 4. 3
Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol
pada Pemilu 2014

No	Nama Partai	Perolehan Kursi		
		P	LK	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	12	13

2	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	-	8	8
3	<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	Partai Amanat Nasional	-	7	7
5	Partai Golongan Karya	1	4	5
6	Partai Demokrat	3	1	4
7	Partai Keadilan Sejahtera	-	3	3
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
9	Partai Nasional Demokrat	-	1	1
10	Partai Bulan Bintang	-	1	1
Total kursi		7	43	50

Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Sidoarjo

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa PKB kembali menjadi partai pemenang pemilu 2014 setelah tergeser pada pemilu sebelumnya. PKB berhasil memperoleh 13 kursi yakni 1 kursi perempuan dan 12 kursi laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2014 ini tidak mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya, namun mampu mempertahankan perolehan kursi untuk perempuan yaitu sebanyak 7 kursi (14 persen). Terdapat 5 partai politik yang berhasil mengantarkan wakil perempuan memperoleh kursi di legislatif pada pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat dengan perolehan terbanyak yakni 3 kursi dan 4 partai lainnya yakni PKB, Golkar, PPP dan Gerindra masing-masing 1 kursi. Terkait konteks penelitian ini yaitu Partai Gerindra mengalami peningkatan dalam perolehan kursi dari pemilu sebelumnya dimana pada pemilu 2014 Partai Gerindra memperoleh 7 kursi dengan rincian 1 kursi perempuan dan 6 kursi laki-laki. Selain itu Partai Gerindra termasuk sebagai partai pendatang baru yang memiliki perolehan kursi yang cukup signifikan dibandingkan partai lainnya. Partai Gerindra pada pemilu 2014 mampu mempertahankan 1 kursi untuk wakil perempuan bahkan pada pemilu selanjutnya Partai Gerindra mampu meningkatkan perolehan 1 kursi untuk wakil perempuan seperti yang terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 4. 4
Perolehan Kursi di DPRD menurut Parpol
pada Pemilu 2019

No	Nama Partai	Perolehan Kursi		
		P	LK	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	14	16
2	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	1	8	9
3	<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>7</u>
4	Partai Amanat Nasional	-	5	5
5	Partai Golongan Karya	-	4	4
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	3	4
7	Partai Demokrat	-	2	2
8	Partai Nasional Demokrat	1	1	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
Total kursi		8	42	50

Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Sidoarjo

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa PKB menjadi partai pemenang pemilu 2019 dengan memperoleh sebanyak 16 kursi yakni 2 kursi perempuan dan 14 kursi laki-laki. Pada urutan kedua setelah PKB, partai dengan perolehan kursi paling banyak pada pemilu 2019 adalah PDIP yang memperoleh 9 kursi dan disusul oleh Partai Gerindra pada urutan ketiga yang memperoleh 7 kursi. Terdapat 6 partai politik yang berhasil mengantarkan wakil perempuan memperoleh kursi di legislatif pada pemilu 2009 yaitu PKB dan Partai Gerindra masing-masing 2 kursi serta PDIP, PKS, Nasdem dan PPP masing-masing 1 kursi, sehingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2019 adalah sebanyak 16 persen atau terdapat 8 orang perempuan yang berhasil lolos dan duduk di lembaga tersebut. Dari sini maka terdapat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sidoarjo dari pemilu sebelumnya. Partai Demokrat yang dalam 2 pemilu sebelumnya yakni 2009 dan 2014 menjadi partai dengan perolehan kursi perempuan terbanyak, pada pemilu 2019 tidak berhasil

mengantarkan 1 kursi pun untuk perempuan. Terkait konteks penelitian ini yaitu Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang mampu meningkatkan perolehan kursi untuk perempuan dimana dari pemilu sebelumnya yang hanya 1 kursi, sementara pada pemilu 2019 ini mampu memperoleh 2 kursi untuk perempuan bahkan menyamai perolehan kursi perempuan dari PKB.

Berdasarkan paparan data diatas, maka diperoleh gambaran bahwa salah satu partai politik yang mendominasi dan memiliki basis massa yang besar dan kuat di Kabupaten Sidoarjo adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal ini dikarenakan secara kultural masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sangat didominasi oleh lingkungan warga Nahdlatul Ulama sehingga menjadikan PKB sebagai salah satu partai politik besar dan mendominasi dalam perpolitikan di Kabupaten Sidoarjo. Sementara, berkaitan dengan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Sidoarjo dapat dinilai masih cukup rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah perolehan kursi perempuan yang mana sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019 lalu belum pernah mencapai angka minimal keterwakilan sebesar 30 persen.

Dalam konteks penelitian ini yaitu Partai Gerindra menjadi partai politik yang mampu memperoleh kursi dengan jumlah yang cukup signifikan dari pemilu 2009 hingga 2019. Selain itu, Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik di Kabupaten Sidoarjo yang secara konsisten mampu mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif selama 3 kali penyelenggaraan pemilu yakni 2009, 2014 dan 2019. Partai Gerindra menjadi salah satu partai politik selain PKB sebagai partai besar di Kabupaten Sidoarjo yang mampu secara konsisten mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif. Hal tersebut membuktikan bahwa Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dan upaya-upaya yang serius dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik.

d. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Sidoarjo

Upaya pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik tidak hanya menjadi tugas, peran dan tanggung jawab dari partai politik melainkan juga pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, terdapat beberapa program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dimiliki dan telah dijalankan oleh Dinas P3AKB yaitu kegiatan penguatan kapasitas politik atau pembekalan politik untuk calon anggota legislatif perempuan dari setiap partai politik. Selain itu terdapat program dan kegiatan penguatan politik yang diberikan oleh Dinas P3AKB kepada kepala desa perempuan, organisasi-organisasi perempuan di Kabupaten Sidoarjo seperti Muslimat, Aisiyah, GOW, dan mahasiswa-mahasiswa perempuan di beberapa universitas di Kabupaten Sidoarjo seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) dan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA).⁸⁰

Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo meskipun tidak memiliki program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik secara spesifik, namun terdapat program dan kegiatan yang mengarah pada hal tersebut yakni menyalurkan bantuan keuangan untuk partai politik dimana 50 persen dari bantuan tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik didalam partai. Melalui bantuan tersebut diharapkan partai dapat menjalankan kegiatan pemberdayaan di bidang politik salah satunya yakni pendidikan politik untuk kader-kadernya baik perempuan maupun laki-laki. Berbagai program dan kegiatan yang dimiliki dan telah dijalankan oleh kedua lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan

⁸⁰ Wawancara dengan Bambang Teguh Budiono, selaku tokoh masyarakat dari Dinas PPA dan KB Kabupaten Sidoarjo, pada 27 Mei 2022

pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik khususnya di Kabupaten Sidoarjo.⁸¹

2. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

a. Sejarah Berdirinya Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra merupakan partai politik di Indonesia yang lahir menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, tepatnya pada 6 Februari 2008. Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang berideologi nasionalis-kerakyatan. Pembentukan partai ini bermula dari keprihatinan dan keinginan untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Awal dicetuskannya gagasan pendirian Partai Gerindra bermula dari suatu perbincangan pada November 2007 antara seorang intelektual muda, Fadli Zon dan pengusaha, Hashim Djojohadikusumo mengenai situasi politik yang dinilai telah semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital yang besar, sehingga mengakibatkan rakyat hanya dijadikan sebagai alat. Selain itu, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik dapat dengan mudah menjadi korban. Jika hal tersebut dibiarkan maka negara hanya akan diperintah oleh para mafia.

Mengingat situasi politik yang sedemikian buruk dan terinspirasi dari kata-kata politisi Inggris yaitu Edmund Burke pada abad kedelapan belas yang pada intinya menjelaskan bahwa *jika orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahatlah yang akan bertindak*, Fadli Zon dan Hashim menyepakati bahwa dibutuhkan sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru dengan tujuan agar negara dapat diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan golongannya saja. Kemudian gagasan pendirian

⁸¹ Wawancara dengan Bambang Lukman, selaku tokoh masyarakat dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, pada 30 Mei 2022

partai mulai diwacanakan dilingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Dalam perjalannya, pembahasan terkait wacana ini tidak lepas dari berbagai persoalan dimana ada pihak yang menolak atau tidak menyetujui gagasan tersebut. Namun setelah perdebatan yang cukup panjang, kemudian disepakati bahwa diperlukan adanya partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat.

Pada Desember 2007, dimulailah pematangan konsep partai termasuk pembahasan mengenai pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Bermunculan sejumlah nama yang turut andil dalam proses tersebut yaitu Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardyanto dan Prof. Suhardi. Melalui perbincangan dan pembahasan pendirian partai yang dilakukan siang dan malam, pada akhirnya nama Gerindra muncul yang mana nama tersebut dicetuskan oleh Hashim sendiri. Sementara untuk lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto. Pembentukan Partai Gerindra dapat dikatakan cukup mendasak sebab pada saat pendeklarasiannya berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum yakni pada 6 Februari 2008.

Dalam deklarasi tersebut, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan sehingga perbedaan yang ada justru menjadi rahmat dan kekuatan bangsa. Namun demikian, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan. Sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam perjalanannya kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar yang

menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra terpenggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indoneisa serta bertekad untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.⁸²

b. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi :

Partai Gerindra memiliki visi untuk menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik Negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, bekepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi dalam kehidupan berbangsan dan bernegara, antara lain :

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945
- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat

⁸² Partai Gerindra, “Sejarah Partai Gerindra”, <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>, (diakses pada 15 April 2022 pukul 22.00)

- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.⁸³

c. Profil DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo terbentuk tidak lama setelah di deklarasikannya Partai Gerindra di tingkat pusat pada tahun 2008, sehingga Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo telah ikut serta dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) tahun 2009. Walaupun masih baru terbentuk, namun pada penyelenggaraan pemilu di tahun tersebut DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah mampu mendapatkan 2 kursi di legislatif (1 perempuan dan 1 laki-laki). Pada penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun berikutnya, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo secara konsisten mampu mendapatkan kursi legislatif yakni pada Pileg tahun 2014 sebanyak 7 kursi (1 perempuan dan 6 laki-laki) dan Pileg tahun 2019 sebanyak 7 kursi (2 perempuan dan 5 laki-laki).⁸⁴ Terhitung usai Pileg tahun 2009, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali melakukan pergantian kepengurusan dan pada tahun 2020 kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo di ketuai oleh Kayan, S.H.

⁸³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, Pasal 9 dan 10

⁸⁴ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

d. Struktur Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Surat Keputusan nomor 03-0039/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

**Tabel 4. 5
Susunan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo**

No	Nama	Jabatan
1	Kayan, S.H	Ketua
2	Ny. Hj. Mimik Idayana	Wakil Ketua
3	Slamet Supodo	
4	Bambang Setyo Budi Wahyono	
5	Muhammad Yanto	
6	H. Amaludin Wahab	
7	Bambang Subiyanto	
8	Zario Andhita	
9	H. Kujairi	
10	Ny. Roro Ira Damayanti, S.H, M.Si	
11	Mochammad Syaful Imaddudin	
12	Istighfarin Machmuda	
13	H. Widagdo	
14	H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.M	
15	H. Bashor, S.H	
16	Ny. Rochmania	
17	M. Nuril Mubin	
18	Sigit Imam Basuki	
19	Ny. Agustin Dwi Wulandari	
20	Ny. Rahmi Aulia	
21	Andi Taurusanto	
22	Ny. Sofiatun Wahyu Ningrum	
23	Ny. Irda Bella Af	

24	Sujono		
25	Fransiscus Nggaa Don Bosco		
26	Ny. Erna Kusumawati		
27	Ny. Enik Mufidah		
28	Ny. Lidia Iik Miadi		
29	Riyanto		
30	Riyadi Sudarismo		
31	Heru Purnomo		
32	Ny. Santi Dewanti		
33	Moch. Sujayadi		Sekretaris
34	Sumanto Radix Abdillah		Wakil Sekretaris
35	Ny. Novita Indriyani		
36	Riva Eko Sudjarwoko		
37	Ny. Hj. Yunik Nur Aini	Bendahara	
38	Ali Muhyiddin	Wakil Bendahara	
39	Dino Sugiono		
40	H. Anang Siswandoko		

Sumber : SK DPP Partai Gerindra tahun 2020

e. Pengurus Cabang PIRA Kabupaten Sidoarjo

Partai Gerindra memiliki organisasi sayap atau *underbow* partai khusus perempuan bernama Perempuan Indonesia Raya atau yang disingkat PIRA. Lahirnya PIRA dilatar belakangi oleh fakta dimana separuh dari lebih 240 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Maka rayanya Indonesia, juga ditentukan oleh andil para perempuan negeri ini. Perjalanan menuju bangsa yang berhasil, besar dan bermartabat, separuhnya terwujud lewat peran perempuan. Partai Gerindra sadar betul akan fakta ini. Perempuan Indonesia adalah potensi. Mereka pasti mampu berperan strategis di tengah segala kondisi masyarakat. Sejarah telah membuktikan di saat kritis sering kali perempuan memiliki ketanggahan dan inisiatif untuk bangkit menopang keluarga dan akhirnya

menyelamatkan masyarakat di lingkungannya. Langkah mereka tercatat telah berkali-kali berhasil memperbaiki sosial, budaya dan perekonomian baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan.

Perempuan Indonesia Raya (PIRA) berdiri tidak lama setelah berdirinya Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. PIRA berdiri di Jakarta pada 9 Oktober 2008, mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan sebagai warga bangsa, utamanya berpolitik praktis. Politik dalam kehidupan sehari-hari, bukan hal yang asing bagi perempuan. Tetapi politik dalam jalur resmi dan terakreditasi dalam partai politik, masih langka untuk perempuan. Visi PIRA adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui gerakan perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ekonomi kerakyatan, pendidikan, budaya, dan kesehatan dalam rangka kemandirian bangsa. Misi PIRA yaitu menjalankannya dengan bergabung dalam Partai Gerindra.⁸⁵ Organisasi sayap PIRA terdapat di berbagai tingkatan mulai dari tingkat nasional (Pimpinan Pusat), provinsi (Pengurus Daerah), kabupaten atau kota (Pengurus Cabang), hingga kecamatan (Pengurus Anak Cabang) dan desa (Ranting).

Pengurus Cabang (PC) PIRA Kabupaten Sidoarjo terbentuk pada Desember tahun 2020 dan di ketuai oleh Hj. Mimik Idayana. Pada awal Maret tahun 2021, PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berhasil membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa. Saat ini PIRA telah tersebar di 18 kecamatan dan 354 desa atau ranting seluruh Kabupaten Sidoarjo melalui proses penjangkaran perempuan terbaik dan militan. Dari awal terbentuk hingga saat ini, PC PIRA Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan berbagai program atau kegiatan baik di bidang politik, sosial, pendidikan dan ekonomi.⁸⁶

⁸⁵ <https://pira.or.id/>, (diakses pada 15 April 2022 pukul 10.00)

⁸⁶ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

B. Analisis dan Pembahasan

1. Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Perempuan merupakan salah satu kelompok di dalam masyarakat yang tidak berdaya atau lemah secara struktural dimana ketidakberdayaan atau kelemahan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang menimpa mereka dalam aspek-aspek kehidupan tertentu salah satunya politik. Dominasi budaya patriarki dan stereotipe terhadap kaum perempuan dalam kaitannya dengan politik merupakan wujud nyata dari ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan perempuan lemah dan tidak memiliki kekuatan atau keberdayaan untuk berperan dalam dunia politik. Pada akhirnya, perempuan baik dalam hal kehadiran maupun kepentingannya di ranah politik seringkali termarginalkan. Meskipun berbagai upaya melalui kebijakan telah dibuat oleh negara dalam rangka mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik, pada praktiknya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik sampai saat ini masih minim bahkan belum memadai.

Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit lainnya guna mendukung keterlibatan perempuan dalam politik dan mengatasi marginalisasi perempuan dalam politik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam bidang politik terutama melalui partai politik. Pemberdayaan berarti memperkuat kelompok lemah atau tidak berdaya salah satunya perempuan agar mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam upaya dan mencapai tujuan pemberdayaan menurut Edi Suharto dapat dilakukan dengan menerapkan 5 pendekatan atau yang disingkat 5P yaitu pemungkinan, pengutan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.⁸⁷

⁸⁷ Edi Suharto, *op.cit*, hal. 58-60

Sayangnya realitas menunjukkan bahwasannya partai politik sebagai salah satu aktor utama dalam memberdayakan perempuan di bidang politik selama ini belum serius dan optimal dalam menjalankan upaya tersebut. Padahal dengan perempuan diberdayakan di bidang politik terutama melalui partai politik diharapkan dapat membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran sehingga perempuan dapat turut merasakan manfaat dari keputusan tersebut serta pada gilirannya mampu memberdayakan kelompok perempuan lainnya.⁸⁸ Selain itu, juga diharapkan perempuan dapat turut serta mengisi pembangunan lewat jalur politik.⁸⁹

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra khususnya di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu partai politik yang menunjukkan perhatian dan komitmen yang serius dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Menurut Partai Gerindra, pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan. Pemberdayaan perempuan menurut Partai Gerindra penting untuk dilakukan agar perempuan dapat turut serta dalam memajukan bangsa dan terbebas dari diskriminasi, ketidakadilan serta marginalisasi.⁹⁰

Keberhasilan Partai Gerindra dalam mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif selama 3 kali penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu bukti nyata komitmen dan keseriusan Partai Gerindra dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik selain Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai besar di Kabupaten Sidoarjo yang mampu secara konsisten dalam mendudukkan kader perempuan di lembaga legislatif. Tentu keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai

⁸⁸ Wawancara dengan Bambang Teguh Budiono, selaku tokoh masyarakat dari Dinas PPA dan KB Kabupaten Sidoarjo, pada 27 Mei 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Bambang Lukman, selaku tokoh masyarakat dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, pada 30 Mei 2022

⁹⁰ Partai Gerindra, Dokumen Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, Poin 16 Bidang Hak-Hak Perempuan, hal. 44, <http://partaigerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-gerindra>, (diakses pada 14 Juli 2022 pukul 14.00 WIB)

upaya yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra khususnya DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan perempuan di bidang politik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwasannya upaya pemberdayaan terhadap perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Selain itu juga ditemukan bahwasannya pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dilakukan baik terhadap perempuan kader partai maupun perempuan umum atau masyarakat.

a. Perempuan Kader Partai

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya.⁹¹ Kehadiran anggota terutama kader sangat penting bagi partai politik sebab mereka menjadi sumber daya utama untuk menjalankan fungsi dan roda organisasi, serta memperjuangkan program partai. Maka dari itu partai politik dalam hal ini dapat menjalankan salah satu peran strategisnya yaitu memberdayakan kader-kadernya di bidang politik terutama kader perempuan partai mengingat perempuan merupakan kelompok yang termarginalkan dalam politik. Sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menerapkan lima pendekatan dalam upayanya memberdayakan perempuan kader partai, diantaranya yaitu :

1) Pemungkinan

Pemberdayaan dalam pendekatan pemungkinan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

⁹¹ Miriam Budiardjo, op.cit, hal.403

kelompok lemah dan tidak berdaya dapat berkembang secara optimal. Setiap manusia baik itu perempuan maupun laki-laki pada dasarnya sama-sama memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk turut berperan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya politik. Namun sayangnya, perempuan beserta potensinya seringkali kurang dihargai dan dipandang rendah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial budaya selama ini kurang mendukung pengembangan potensi perempuan khususnya di bidang politik. Padahal perempuan memiliki potensi yang besar di bidang politik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo :

“Potensi perempuan di bidang politik itu sangat besar, potensi yang saya rasa baik dan besar dari perempuan di politik itu punya kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.....lebih greget atau getol sekali dalam memperjuangkan hal-hal yang ketika itu bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat”⁹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang kader perempuan Partai Gerindra :

“Perempuan itu punya potensi yang besar terutama dalam hal yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat termasuk kelompok perempuan dan anak yang ada di masyarakat”⁹³

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan anak serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi dibandingkan laki-laki. Potensi perempuan yang besar di bidang politik tersebut perlu dikembangkan dan dioptimalkan karena dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan serta menjadikan kehidupan politik lebih demokratis. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suharto, dalam rangka memberdayakan maka dibutuhkan suatu upaya yang mampu

⁹² Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

⁹³ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan kelompok lemah dan tidak berdaya seperti perempuan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal khususnya di bidang politik. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif yakni kebijakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai, pencalonan anggota legislatif, fraksi atau anggota legislatif maupun kepengurusan organisasi sayap. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Terkait hal tersebut, yang pasti kami di Partai Gerindra untuk kepengurusan baik di tingkat DPC, PAC dan Ranting minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen harus terpenuhi. Selain itu dalam proses pencalegan pun sama, minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen itu harus terpenuhi. Saat ini kader-kader perempuan kami genjot dan kami prioritaskan agar keterwakilan perempuan di fraksi atau anggota legislatif itu bisa signifikan, sehingga tidak hanya dalam proses pencalegan terpenuhi. Kami juga mengharuskan di organisasi-organisasi sayap kami selain yang memang khusus untuk perempuan seperti Tidar, Satria dan sebagainya, keterwakilan perempuan minimal 30 persen juga harus terpenuhi”⁹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh dua orang kader perempuan Partai Gerindra :

“.....kebijakan yang terkait perempuan intinya di partai ini yang saya tahu ya kuota minimal keterwakilan 30 persen itu, saya rasa partai sudah maksimal dan memang komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut”⁹⁵

“.....kalau bicara kebijakan yang berkaitan dengan perempuan disini itu pemenuhan keterwakilan, selama ini Partai dalam hal memenuhi kuota minimal keterwakilan itu benar-benar telah dijalankan dengan baik, baik itu dalam kepengurusan partai di tingkat DPC, PAC sampai Ranting, lalu di sayap seperti Tidar, Satria, Kesira banyak perwakilan perempuannya di sayap-sayap

⁹⁴ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

⁹⁵ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

tersebut dan jika konteksnya pemilihan ya dalam pencalonan legislatif itu juga selalu memenuhi”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan tersebut terlihat bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang serius dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif, tidak hanya dalam hal kepengurusan partai di berbagai tingkatan dan daftar pencalonan anggota legislatif sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Partai Politik, namun juga dalam fraksi atau anggota legislatif dan kepengurusan organisasi sayap partai.

Kebijakan afirmatif sendiri merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu seperti gender ataupun profesi memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Dalam konteks politik, kebijakan afirmatif dimaksudkan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga politik seperti partai politik dan lembaga legislatif dapat lebih representatif.⁹⁷ Berdasarkan studi dokumen, ditemukan bahwa kebijakan afirmatif pada Partai Gerindra terdapat di dalam AD/ART Partai Pasal 7 ayat 4, Pasal 8 ayat 4, Pasal 9 ayat 4, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 4 mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat (DPP), provinsi (DPD), kabupaten/kota (DPC), kecamatan (PAC) hingga desa/kelurahan (Ranting).⁹⁸

Upaya mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu upaya dalam memberdayakan perempuan di bidang politik sebab melalui upaya tersebut mampu membuka ruang dan kesempatan yang

⁹⁶ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

⁹⁷ I Ketut Arka, Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No. 3, 2021*, hal.750

⁹⁸ AD/ART Partai Gerindra Pasal 7,8,9,10, dan 11 yang intinya berbunyi : “Jumlah Pengurus Harian (DPP, DPD, DPC, PAC dan Ranting) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”

lebih besar bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam berbagai aktivitas dan proses politik. Keterlibatan perempuan khususnya dalam hal ini perempuan kader dalam berbagai aktivitas dan proses politik termasuk duduk dalam jabatan strategis di partai maupun nantinya di lembaga politik formal dalam prosesnya mampu memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik. Upaya partai dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif dalam praktiknya mampu memperkuat posisi dan peran perempuan kader baik di dalam partai politik maupun di ranah politik yang lebih luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang kader perempuan Partai Gerindra berikut ini :

“...menurut saya memang dengan partai benar-benar komitmen dan maksimal menjalankan kebijakan tersebut insyaAllah mampu memperkuat peran dan posisi kami sebagai kader perempuan di partai maupun di ranah politik yang lebih luas”⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengimplementasian kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya dalam rangka memberdayakan perempuan di bidang politik sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suharto yakni memperkuat perempuan sebagai salah satu kelompok lemah dan tidak berdaya agar mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan kader partai dapat berkembang secara optimal adalah dengan membentuk bidang dan organisasi sayap khusus perempuan. Bidang dan organisasi sayap khusus perempuan di Partai Gerindra adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Indonesia Raya atau yang disingkat PIRA. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

⁹⁹ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

“Kemudian saya kira, selain terkait kebijakan keterwakilan tadi kami juga memiliki bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi sayap yang khusus untuk perempuan namanya PIRA, pada intinya menjadi wadah yang memang disediakan oleh partailah istilahnya untuk memberdayakan perempuan”¹⁰⁰

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan beserta kedua orang kader perempuan Partai Gerindra :

“Untuk dari Partai Gerindra sendiri, terkait pemberdayaan perempuan menurut saya melalui adanya sayap perempuan, namanya PIRA. Jadi di PIRA ini 100 persen memang diurus oleh kaum perempuan sendiri dan sayap ini berada di bawah naungan partai. Pada intinya di Gerindra ini, kami perempuan-perempuan ini sudah diwadahi dan diberikan ruang yang luas untuk dapat berkoprasi istilahnya di ranah politik atau publik”¹⁰¹

“...disini ada bidang pemberdayaan perempuan terus ada juga PIRA sebagai sayap perempuan”¹⁰²

“...di Partai Gerindra ini ada bidang yang khusus perempuan baik itu bidang pemberdayaan perempuan yang ada di kepengurusan dan ada juga organisasi sayap Gerindra yang khusus perempuan, namanya PIRA”¹⁰³

Menurut kajian dari Puskapol UI dan MPI tahun 2017, secara umum pembentukan bidang maupun organisasi sayap khusus perempuan pada partai politik dilatarbelakangi oleh 3 alasan, yaitu (1) sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan, (2) institusionalisasi kepartaian dalam rangka pengakaran partai (*party rooting*) khususnya pada kalangan penduduk dan pemilih perempuan dan (3) sebagai sarana agregasi dan artikulasi kebijakan partai yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹⁰¹ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹⁰² Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹⁰³ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

¹⁰⁴ Hurriyah dan Delia Wildianti, *Partisipasi tanpa Representasi : Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia*, Prosiding Simposium Hukum Tata Negara : Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, (Yogyakarta : FH UII Press, 2020), hal.304

Pembentukan bidang dan organisasi sayap khusus perempuan pada Partai Gerindra sendiri dilatarbelakangi oleh realitas dimana kaum perempuan sampai saat ini masih menjadi kelompok yang termarginalkan dan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu buktinya nyatanya adalah masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti kekerasan seksual dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu wadah khusus didalam partai politik untuk mewadahi perempuan dan menyerap aspirasi perempuan dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan sekaligus kewajiban terhadap perlindungan perempuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra berikut ini :

“Intinya menjadi wadah bagi perempuan, kemudian untuk menyerap aspirasi perempuan tentunya, karena perempuan ini kan masih menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana caranya agar hak-hak perempuan dan kewajiban terhadap perlindungan perempuan dapat terwadahi, nah di partai ini ya melalui bidang pemberdayaan perempuan dan PIRA yang khusus untuk mewadahi perempuan itu tadi. Saat ini banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya yang paling banyak itu pemerkosaan dan beberapa kasus lain terkait kekerasan terhadap perempuan.”¹⁰⁵

Bidang pemberdayaan perempuan merupakan bidang atau divisi khusus perempuan yang terdapat di dalam struktur partai. Bidang pemberdayaan perempuan pada Partai Gerindra menjalankan beberapa fungsi/tugas dan wewenang yaitu merangkul perempuan kader agar mampu berpolitik dengan baik, memberikan penyadaran politik dan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap organisasi sayap PIRA. Untuk menjalankan fungsi/tugas pendampingan dan monitoring tersebut, bidang pemberdayaan perempuan partai mengadakan pertemuan khusus perempuan dalam bentuk sarasehan setiap 6 bulan sekali melalui wadah PIRA di berbagai tingkatan baik itu di tingkat kabupaten (DPC), kecamatan (PAC) dan desa/kelurahan (Ranting).

¹⁰⁵ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

Dalam kegiatan sarasehan tersebut, bidang pemberdayaan perempuan partai berdiskusi bersama perempuan kader partai dan kader PIRA mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh PIRA selama menjalankan program atau kegiatan serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut dan usulan terkait program atau kegiatan baru yang ingin dijalankan di PIRA. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan berikut ini:

“Tugas kami dari bidang pemberdayaan perempuan pada umumnya merangkul semua perempuan kami agar mampu berpolitik dengan baik, kemudian kami khususnya dari bidang perempuan tentunya selalu dan terus menerus menyampaikan kepada perempuan-perempuan kami bahwa sebagai perempuan kita ini punya kemampuan yang sama untuk dapat berperan di segala bidang termasuk dalam konteks ini politik. Kami dari bidang pemberdayaan perempuan selalu mengadakan kegiatan pertemuan dengan teman-teman perempuan mbak semacam sarasehan ya melalui PIRA ini mulai dari tingkat PC atau kabupaten, kecamatan hingga ranting per 6 bulan sekali itu dan gantian tempatnya mbak misal di kecamatan A dulu, berikutnya di kecamatan B, jadi kita kumpul dan ngobrol terkait apa saja keluhan selama dilapangan nanti kita bisa cari solusinya bersama, lalu usulan atau ide-ide terkait program atau kegiatan baru yang ingin dijalankan dan sebagainya. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan khusus perempuan kami serahkan di PIRA dan kami dari bidang pemberdayaan perempuan partai akan selalu mendampingi dan memonitor PIRA itu tadi”¹⁰⁶

Selain itu fungsi atau tugas bidang pemberdayaan perempuan yang cukup strategis adalah menjadi saluran utama untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan politik perempuan di internal partai. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan yang disampaikan kepada pimpinan dan pengurus partai dalam momen rapat atau pertemuan partai mengenai kasus kekerasan seksual yang masih banyak dialami oleh perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan salah satu daerah atau kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan

¹⁰⁶ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

dan anak tertinggi di Jawa Timur.¹⁰⁷ Laporan tersebut didapatkan dari aduan-aduan masyarakat yang telah ditampung oleh organisasi sayap PIRA yang kemudian disampaikan kepada bidang pemberdayaan perempuan partai. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh partai dengan menitipkan laporan tersebut untuk disuarakan oleh kader partai khususnya perempuan kader partai yang duduk di lembaga legislatif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra :

“Kasus atau isu-isu tersebut sudah pernah disampaikan oleh Bu Roro selaku wakil ketua bidang pemberdayaan kepada kami dan pimpinan, sudah pernah dibahas dalam rapat atau pertemuan partai, kami titipkan kasus-kasus tersebut khususnya ke wakil-wakil perempuan kami untuk kemudian disuarakan di legislatif”¹⁰⁸

Selanjutnya, PIRA atau Perempuan Indonesia Raya merupakan organisasi sayap atau *underbow* partai khusus perempuan yang didirikan tidak lama setelah berdirinya Partai Gerindra tepatnya pada 9 Oktober 2008. PIRA di Kabupaten Sidoarjo baru terbentuk secara resmi pada bulan Desember tahun 2020. Sebagai organisasi sayap partai khusus perempuan, fungsi/tugas dan wewenang dari PIRA adalah mewadahi kaum perempuan untuk berpolitik baik itu perempuan kader partai maupun perempuan umum atau dari kalangan masyarakat, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, mewadahi aspirasi-aspirasi perempuan dan membuat serta menjalankan berbagai agenda atau kegiatan yang sesuai dengan aspirasi perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua dan seorang kader PIRA Sidoarjo berikut ini :

“Pada intinya kami mewadahi dan menampung perempuan untuk berpolitik atau masuk dalam dunia politik. Bagaimana melalui kegiatan-kegiatan di PIRA ini kemudian dapat menjadikan perempuan memiliki ketertarikan dan kepedulian untuk berpolitik sebab perempuan harus bisa berpolitik baik dalam kehidupan

¹⁰⁷ Boby Yanuar, “Sidoarjo jadi Daerah dengan Kekerasan Seksual Tertinggi di Jatim”, <https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1294504/sidoarjo-jadi-daerah-dengan-kekerasan-seksual-tertinggi-di-jatim>, (diakses pada 15 September 2022 pukul 09.00)

¹⁰⁸ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

sehari-hari maupun dalam kehidupan bersosial.....kami diberikan ruang dan wewenang untuk membuat acara ini, kegiatan itu sesuai aspirasi kami perempuan, ya untuk kemajuan emak-emak atau perempuan-perempuan ini”¹⁰⁹

“Karena saya ini di PIRA kecamatan atau di PAC maka fungsinya adalah bagaimana melalui PIRA ini seluruh aspirasi-aspirasi perempuan yang ada di bawah atau tingkat desa bisa tersalurkan terutama ke anggota-anggota dewan, jadi pada intinya ya mewadahi aspirasi-aspirasi perempuan”¹¹⁰

Terkait dengan wewenang PIRA untuk membuat dan menjalankan berbagai agenda atau kegiatan yang sesuai dengan aspirasi perempuan juga turut disampaikan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

“PIRA oleh partai diberikan izin untuk membuat berbagai agenda kerja ataupun kegiatan sendiri sesuai dengan porsinya sebagai organisasi sayap khusus perempuan selama menurut partai itu positif, tidak mengikat atau memaksa dan sesuai dengan kebijakan ataupun program partai”¹¹¹

Mencermati dari fungsi/tugas dan wewenang dari bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi sayap PIRA yang telah dijabarkan diatas, selain sebagai wadah pemberdayaan perempuan yakni menampung aspirasi perempuan, dalam konteks pendekatan pemungkinan sesuai yang dikemukakan oleh Edi Suharto bahwa dalam memberdayakan dibutuhkan suatu upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan kader dapat berkembang secara optimal, maka dibentuknya bidang dan organisasi sayap khusus perempuan menjadi wadah bagi partai untuk memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik.

Hal ini dikarenakan melalui bidang dan organisasi sayap PIRA yang mana sepenuhnya diurus dan dijalankan oleh perempuan, perempuan kader dilatih untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan potensinya dalam berpolitik yaitu kemampuan dalam

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

¹¹⁰ Wawancara dengan Anik Windiastris pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹¹¹ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

berorganisasi dan kemandirian dalam merumuskan, menentukan dan menjalankan sendiri berbagai agenda ataupun kegiatan yang menjadi aspirasi dan kepentingan politik perempuan. Tanpa adanya bidang maupun organisasi sayap khusus perempuan dalam suatu partai, maka tidak akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan, untuk itu harus perempuan sendiri yang memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan tersebut.¹¹²

Selain itu, melalui berbagai program atau kegiatan yang dijalankan dalam wadah tersebut khususnya organisasi sayap, perempuan kader juga dilatih untuk mengembangkan dan meningkatkan potensinya dalam berpolitik untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dari masyarakat khususnya kelompok perempuan serta membuat alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Berbagai potensi yang telah dikembangkan dan dioptimalkan melalui wadah tersebut diharapkan mampu menjadikan perempuan kader semakin berdaya dalam berpolitik.

Selain melalui pengimplementasian kebijakan afirmatif dan pembentukan bidang maupun organisasi sayap khusus perempuan, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan kader dapat berkembang secara optimal di bidang politik adalah dengan menjalankan kaderisasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Untuk mengembangkannya kader-kader perempuan kami bina melalui proses kaderisasi. Kaderisasi khusus perempuan di partai kami prosesnya melalui organisasi sayap dulu yakni PIRA baru ke induk organisasi partai. Setelah disana ditempa atau dibentuk dan memperoleh banyak ilmu baru ke partainya. Jadi melalui proses

¹¹² Komang Eva Oktapiani, dkk, *op.cit*, hal. 3

tersebut dapat kita lihat dan nilai juga bagaimana keaktifannya, integritasnya dan kredibilitasnya kepada partai selama ini, siapa saja yang berpotensi dan jika sudah memenuhi standar tersebut, kami bisa naikkan atau usulkan untuk menempati posisi-posisi di kepengurusan partai”¹¹³

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan beserta salah seorang kader perempuan Partai Gerindra :

“Untuk mengembangkan atau mengoptimalkan potensi atau perannya tersebut ya tentu perempuan-perempuan ini oleh partai akan di kader, pasti itu dan hal tersebut kami lakukan dalam rangka untuk mencari sosok-sosok perempuan tangguh dan berpotensi yang nantinya mampu menjadi kepanjangan tangan masyarakat atau di legislatif nantinya. Kadersasi khusus untuk perempuan itu lebih banyak mengarah pada kegiatan-kegiatan yang ada di PIRA itu tadi, sehingga disitu perempuan dibina dan diproses, nanti akan terlihat siapa saja yang aktif dan menonjol”¹¹⁴

“Untuk prosesnya itu ya dengan di kader. Memang kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kader yang khusus untuk perempuan itu lebih banyak kegiatannya ada di PIRA”¹¹⁵

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan tersebut, dapat dipahami bahwa kaderisasi khusus perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dijalankan melalui wadah organisasi sayap PIRA. Kaderisasi khusus perempuan yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjadi upaya sekaligus sarana untuk memberdayakan potensi perempuan kader di bidang politik. Hal ini dikarenakan melalui proses tersebut, perempuan kader dibina, dikembangkan dan dioptimalkan segenap potensinya di bidang politik. Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara menanamkan nilai-nilai tertentu hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang

¹¹³ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹¹⁴ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹¹⁵ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

tangguh.¹¹⁶ Kaderisasi dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mempersiapkan secara optimal perempuan-perempuan kader untuk berkiprah di dunia politik dan menjadi calon-calon pemimpin.¹¹⁷

Kaderisasi khusus perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dijalankan secara berjenjang dimana jenjang pengkaderan dimulai dari menjadi kader atau anggota organisasi sayap, kemudian berlanjut menjadi pengurus partai hingga diusulkan dan diajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum. Pada setiap tahapan penjejang tersebut terdapat penilaian yang didasarkan pada sejauhmana partisipasi, keaktifan dan kontribusi perempuan dalam setiap program atau kegiatan yang diadakan. Kaderisasi khusus perempuan melalui wadah organisasi sayap PIRA dijalankan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti diskusi antar perempuan mengenai isu-isu seputar politik terkini, dikirim untuk mengikuti diklat, diikutsertakan dalam kegiatan reses dan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif, kegiatan sosial ke masyarakat seperti bakti sosial, menyerap aspirasi atau aduan-aduan dari masyarakat khususnya kelompok perempuan, kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi seperti pelatihan untuk perempuan UMKM, dan beberapa kegiatan lainnya.

2) Penguatan

Pemberdayaan dalam pendekatan penguatan dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya di dalam masyarakat yakni perempuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan perempuan kader partai di bidang politik, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pendidikan

¹¹⁶ Rizki Krizma Cahya Ramadhani, Pelaksanaan Kaderisasi Perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 8 Edisi II*, 2021, hal.11

¹¹⁷ Nurman, *op.cit*, hal.64

politik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Kami berikan pendidikan politik kepada semua kader kami mencakup perempuan maupun laki-laki. Untuk saat ini kami sedang rutin menggalakkan kegiatan pertemuan dalam rangka pendidikan politik dengan seluruh pengurus partai mulai dari level DPC, PAC hingga ranting tiap 2 bulan sekali. Kami juga mengadakan sarasehan politik berbarengan dengan pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan pendidikan politik. Ada kegiatan diklat untuk kader, diadakan per 6 bulan sekali dan diselenggarakan di Hambalang. Untuk yang dikirim kesana (diklat kader) itu kader partai masing-masing kecamatan 1 orang, sekali lagi kita tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Disana kader-kader ditempa, diberikan pendidikan dan pelatihan politik tentang kepemimpinan, penguatan wawasan politik tentang kebangsaan dan Partai Gerindra seperti visi misi, ideologi dan arah perjuangan partai dan sebagainya, kedisiplinan, dan ada juga pembekalan untuk pemenangan pemilu. Pendidikan politik itu lebih kearah pembekalan materi biasanya kita isi materi seputar kebangsaan, mengenai kepartaian Gerindra seperti visi misi partai dimana Partai Gerindra itu lahir tujuannya adalah untuk berjuang bersama masyarakat, tapi kalau sarasehan ya kita kumpul kita bicara seputar politik, semacam sharing-sharing politik ya mengenai bagaimana visi misi kita kedepan, target-target kedepan seperti apa, tentunya tidak jauh dari ranah politik”¹¹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh dua orang kader perempuan Partai Gerindra sebagai berikut:

“Melalui kegiatan pendidikan politik dan sarasehan politik yang diadakan oleh partai. Disitu membahas banyak hal ya dan memang lebih dimaksudkan untuk penguatan internal partai dan tentunya kader. Ada juga kegiatan diklat, kebetulan saya pernah ikut diklat yang dulu namanya itu Garuda Merah Putih atau GMP yang sekarang ganti namanya menjadi Laskar Pandu Garuda (LPG)”¹¹⁹

“Partai selalu ada kegiatan pendidikan politik sekaligus sarasehan politik untuk semua kadernya, tidak hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga. Ada juga Diklat yang di Hambalang. Di diklat itu kegiatannya seputar penyuluhan dan pelatihan politik”¹²⁰

¹¹⁸ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹¹⁹ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

¹²⁰ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan diatas, pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo bersifat umum yakni diperuntukkan bagi semua kader baik itu perempuan maupun laki-laki. Pendidikan politik yang diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo kepada kadernya dijalankan melalui beberapa bentuk kegiatan. Pertama, kegiatan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan pengurus dan kader partai di berbagai tingkatan mulai dari tingkat kabupaten (DPC), kecamatan (PAC) dan ranting (kelurahan/desa) yang mana dalam kegiatan tersebut diisi dengan pembekalan materi seputar kebangsaan dan kepartaian Gerindra (seperti visi misi, tujuan partai) oleh pengurus DPC. Kegiatan tersebut saat ini sedang rutin diselenggarakan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo setiap 2 bulan sekali khususnya di tingkat PAC dan ranting.

Kedua, kegiatan pendidikan politik dalam bentuk sarasehan politik. Sarasehan politik merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan politik berupa dialog atau *sharing* politik antar pengurus dan kader partai mengenai visi misi partai kedepan dan target-target partai yang hendak dicapai kedepannya. Sarasehan politik diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pertemuan pengurus dan kader dalam rangka pendidikan politik. Ketiga, kegiatan pendidikan politik dalam bentuk diklat kader (pendidikan dan pelatihan). DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini tidak menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut, melainkan dengan mengirimkan atau mendelegasikan kadernya baik itu perempuan maupun laki-laki dari setiap kecamatan sebagai perwakilan untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh partai ditingkat pusat (DPP).

Kegiatan diklat kader yang bertempat di Hambalang merupakan program pendidikan politik resmi di Partai Gerindra yang diikuti oleh kader partai di seluruh Indonesia dan diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Terdapat berbagai jenis diklat kader yang ada pada Partai

Gerindra dan menyesuaikan dengan kebutuhan partai seperti Diklat Anggota Legislatif, Diklat Garuda Masa Depan (GMD), Diklat Laskar Pandu Garuda (LPG), dan lain sebagainya. Dalam kegiatan diklat tersebut, kader partai secara umum akan mendapatkan materi pendidikan dan pelatihan politik tentang kepemimpinan, penguatan wawasan politik tentang kebangsaan dan Partai Gerindra meliputi visi misi, ideologi dan arah perjuangan partai, kedisiplinan dan kemenangan pemilu.

Gambar 4. 1
Kegiatan Pendidikan dan Sarasehan Politik



(Kegiatan pendidikan dan sarasehan politik yang diadakan oleh DPC Partai Gerindra di PAC Kecamatan Gedangan dan Sedati pada bulan April 2022, Sumber : Arsip DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo)

Meskipun tidak terdapat kegiatan pendidikan politik formal yang ditujukan secara khusus oleh partai untuk perempuan kader, menurut Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan upaya tersebut dijalankan

melalui kegiatan non formal yaitu dengan mengikutsertakan perempuan kader dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan politik keseharian Partai Gerindra seperti rapat dan konsolidasi partai. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan berpolitik perempuan kader, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan berikut ini:

“Selain itu untuk teman-teman perempuan juga kami ikutkan dalam kegiatan seperti konsolidasi ke kecamatan-kecamatan yang diadakan oleh partai agar kemudian bisa belajar untuk bagaimana sih kalau berdiskusi dengan laki-laki atau bapak-bapak, bagaimana pola pikir yang kemudian harus dibangun seperti itu, kami ikutkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di partai, seperti rapat juga”¹²¹

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya bertujuan untuk mendidik anggota-anggotanya agar menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan mampu menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.¹²² Pendidikan politik yang diberikan oleh DPC Partai Gerindra Sidoarjo kepada kader-kadernya terutama dalam hal ini perempuan kader dimaksudkan untuk memunculkan pejuang-pejuang politik perempuan yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan dan masyarakat.¹²³ Pendidikan politik yang telah diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mampu memperkuat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan perempuan kader di bidang politik namun juga mampu memperkuat kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam dunia politik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh dua orang kader perempuan berikut ini :

“Menurut saya melalui kegiatan-kegiatan itu tadi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman kami sebagai kader tentang politik itu seperti apa, termasuk pentingnya kita terlibat di politik

¹²¹ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹²² Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 407-408

¹²³ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

sih karena memang kalau perempuan itu fokusnya kan lebih ke isu-isu perempuan dan anak ya. Kita perempuan itu kan miris kalau melihat persoalan-persoalan seperti kekurangan gizi pada anak, jadi menurut saya memang penting kita ini untuk terlibat di politik”¹²⁴

“Intinya melalui semua kegiatan tersebut dapat semakin meningkatkan kemampuan dan wawasan kami kader-kader ini tentang politik termasuk pentingnya perempuan di politik”¹²⁵

Pendidikan politik menjadi suatu upaya yang sangat penting untuk dilakukan terutama oleh partai politik dalam rangka memberdayakan perempuan kader di bidang politik sebab persoalan minimnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang politik menjadi salah satu faktor yang selama ini masih menjadikan perempuan kurang berdaya untuk menjalankan kiprahnya dalam dunia politik. Pemberdayaan melalui pendidikan politik diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi perempuan kader agar mampu melibatkan diri secara maksimal dalam ranah perpolitikan terutama dalam proses pengambilan keputusan sehingga perempuan kader benar-benar mampu mengambil peran dan mempengaruhi kebijakan baik di lingkup partai maupun lembaga politik formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan serta mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Dengan begitu, perempuan kader mampu berdaya sebagai subjek yang aktif dan partisipatif dalam politik dan pembangunan.

3) Perlindungan

Pemberdayaan dalam pendekatan perlindungan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok yang lemah dan tidak berdaya yakni perempuan khususnya dalam politik. Ranah politik termasuk partai politik hingga saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam

¹²⁴ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹²⁵ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

politik. Maka dari itu untuk menjadikan perempuan berdaya dalam politik perlu dilakukan suatu upaya untuk memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dan dominasi di bidang politik khususnya dalam partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai. Hal ini pula yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Partai berikut ini :

“Saya rasa partai sudah maksimal dalam hal penempatan perempuan di kepengurusan, di internal sudah memenuhi keterwakilan 30 persen sesuai kebijakan partai. Banyak perempuan disini yang sudah ditempatkan di posisi atau jabatan sebagai ketua bidang, misalnya Bu Roro tadi menjabat sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan partai, lalu Bu Mimik ketua bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan) yang membawahi seluruh organisasi politik PAC dan sayap partai yang ada di Kabupaten Sidoarjo, bendahara partai Bu Yunik Nur Aini. Intinya sudah banyak posisi-posisi penting yang dipegang oleh perempuan di partai kami. Harapan kami perempuan-perempuan bisa turut memengaruhi keputusan ataupun kebijakan partai”¹²⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan dua orang kader perempuan Partai Gerindra sebagai berikut:

“Saya rasa sudah, untuk di kepengurusan partai juga sudah sangat maksimal ya, sudah melampaui 30 persen saya kira dan sudah banyak juga perempuan di posisi sebagai wakil ketua atau ketua bidang dan selalu ada perwakilan perempuan di setiap divisi, sehingga sudah cukup strategis saya rasa. Disini memang semua kader itu ditugaskan ataupun ditempatkan oleh partai di divisi-divisi yang sesuai dengan potensi dan keahliannya, jadi tidak jadi soal apakah itu perempuan atau laki-laki. Dengan begitu ada keseimbangan di partai, jadi intinya baik perempuan maupun laki-laki di partai bisa berjalan bersama Harapannya juga nanti para kader yang ditempatkan sesuai potensi atau keahliannya tersebut

¹²⁶ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

sudah paham apa yang harus mereka lakukan di bidang/divisinya masing-masing.”¹²⁷

“Menurut saya sih sudah, sepengetahuan saya banyak ibu-ibu disini yang juga menjabat sebagai ketua bidang atau divisi”¹²⁸

“Untuk itu saya rasa sudah karena sudah banyak yang ada di posisi sebagai wakil ketua atau ketua bidang, ada juga bendahara, dan di semua divisi ada perwakilan perempuannya. Di partai kami ini memang untuk penempatan kader di posisi-posisi dalam kepengurusan itu disesuaikan dengan porsi atau bidang keahlian yang dimiliki kader, sepengetahuan saya selama ini seperti itu. Bisa saya katakan memang dengan banyaknya perempuan dalam kepengurusan itu tadi nantinya dalam pengambilan keputusan atau musyawarah pandangan-pandangannya bisa turut mempengaruhi, harapannya seperti itu, karena di Gerindra itu semua keputusan juga melalui musyawarah”¹²⁹

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan diatas dapat dilihat bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk menempatkan perempuan kadernya pada jabatan-jabatan yang cukup strategis seperti bendahara dan ketua bidang. Hal tersebut juga didukung dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis terhadap dokumen susunan pengurus partai dimana terdapat 13 orang perempuan (32,5 persen) dalam struktur kepengurusan partai yakni sebanyak 11 orang perempuan pada jabatan ketua bidang, 1 orang perempuan pada jabatan bendahara, dan 1 orang perempuan pada jabatan wakil sekretaris. Dari sini dapat dilihat bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah menempatkan banyak perempuan kadernya pada jabatan yang cukup strategis, sehingga perempuan di dalam partai tidak hanya ditempatkan sebagai pengurus atau anggota biasa.

DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam menempatkan kader termasuk dalam hal ini perempuan kader pada posisi atau jabatan tertentu dalam struktur kepengurusan didasarkan pada potensi ataupun

¹²⁷ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Sidoarjo

¹²⁸ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹²⁹ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

bidang keahlian yang dimiliki oleh kader-kader tersebut, sehingga dari sini terlihat bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menempatkan perempuan dalam struktur kepengurusan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebijakan minimal keterwakilan 30 persen dalam kepengurusan partai.

Menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai menjadi salah satu upaya yang sangat penting untuk menjadikan perempuan berdaya di politik khususnya dalam partai politik. Hal ini dikarenakan dalam struktur kepengurusan hampir di semua partai selama ini mayoritas masih didominasi oleh laki-laki, sehingga dengan perempuan ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan maka perempuan memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk turut serta mempengaruhi dan menentukan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Dengan begitu diharapkan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh partai tidak merugikan dan dapat mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan perempuan.

Penempatan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan juga memegang peranan penting dalam memperkuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yakni turut mempengaruhi dalam hal penentuan calon anggota legislatif, pemberian nomor urut dan penempatan di daerah pemilihan (dapil) terutama yang menjadi basis partai.¹³⁰ Sehingga melalui penempatan di jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan, selain mampu menjadikan perempuan lebih berdaya di politik khususnya dalam partai politik, perempuan juga mampu memberdayakan perempuan lainnya.

Walaupun perempuan kader telah ditempatkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo jabatan-jabatan yang menjadikan

¹³⁰ Cakra Wikara Indonesia, Diskusi Publik: “Menakar Peran dan Posisi Strategis Perempuan di Struktur DPP Partai”, <https://cakrawikara.id/2021/02/diskusi-publik-menakar-peran-dan-posisi-strategis-perempuan-di-struktur-dpp-partai/>, (diakses pada 30 Desember 2022 pukul 20.00)

perempuan dapat turut mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan atau kebijakan partai, hanya saja penentu akhir keputusan atau kebijakan hampir di semua partai termasuk Partai Gerindra berada pada ketua, sekretaris dan bendahara atau yang pada Partai Gerindra disebut KSB, sehingga hanya terdapat 1 orang perempuan saja pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yakni bendahara partai yang benar-benar memiliki jabatan strategis sebagai penentu keputusan atau kebijakan partai.¹³¹ Oleh karena itu, kedepannya upaya ini perlu ditingkatkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk menjadikan perempuan kader lebih berdaya di politik termasuk dalam partai politik.

4) Penyokongan

Pemberdayaan dalam pendekatan penyokongan dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar kelompok lemah dan tidak berdaya seperti perempuan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya khususnya di bidang politik. Kondisi perpolitikan selama ini menunjukkan masih minimnya bimbingan dan dukungan politik yang diberikan oleh partai terutama kepada kader-kader perempuan. Tanpa adanya bimbingan dan dukungan politik dari partai, perempuan kader tentu akan kesulitan dalam menjalankan peran dan tugasnya di ranah politik. Untuk itu bimbingan dan dukungan politik dari pihak partai sangat dibutuhkan bagi perempuan kader agar mampu berdaya dalam berpolitik. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan dorongan dan arahan politik kepada perempuan kader. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Kami terus meminta dan mendorong kader-kader perempuan agar bergerak aktif di kegiatan partai, khususnya juga di kegiatan-kegiatan yang menyentuh hajat hidup orang banyak atau

¹³¹ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

masyarakat seperti yang telah dilakukan selama ini oleh PIRA dan KESIRA”¹³²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh dua orang kader perempuan Partai Gerindra sebagai berikut :

“Partai selama ini memberikan dorongan dan dukungan kepada kami kader-kadernya agar aktif dalam kegiatan politik, karena dari partai dan pimpinan sendiri selalu memberikan arahan kepada semua kader kalau sudah di politik memang diharuskan loyal kita dan kita berkegiatan politik itu kan tujuannya untuk sosial kemasyarakatan jadi ya harus loyal itu tadi, termasuk dorongan untuk maju dalam pemilihan juga”¹³³

“Untuk bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh partai menurut saya selama ini bentuknya lebih ke pengarahan dalam arti kami ini sebagai kader selalu diberikan arahan-arahan oleh partai baik itu ketika proses berkegiatan di partai maupun pemilihan. Jadi dengan arahan itu tadi, intinya kami ya sudah tahu dan paham begitu apa yang harus kami lakukan saat berkegiatan di partai atau yang lainnya”¹³⁴

Dukungan politik berupa dorongan yang diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo kepada perempuan kader dimaksudkan agar perempuan kader dapat aktif dalam berkegiatan politik di partai, masyarakat maupun maju dalam pemilihan umum. Sementara, bimbingan politik berupa arahan diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar perempuan kader dapat memahami peran dan tugas yang harus dijalankan dalam berkegiatan politik di partai. Upaya tersebut dapat menjadikan perempuan kader terus termotivasi untuk memberdayakan diri mereka di bidang politik dan partai politik. Selanjutnya, bimbingan dan dukungan politik juga diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan pembekalan politik kepada seluruh kader termasuk perempuan kader menjelang pemilihan umum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan berikut ini :

¹³² Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹³³ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹³⁴ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

“Untuk itu sudah jelas, kami pasti membimbing dan mendukung kader-kader perempuan kami. Secara praktisnya seperti pada saat mendekati pemilihan tepatnya setahun sebelumnya, partai itu akan memberikan bimbingan dan dukungan dalam bentuk semacam pembekalan kepada seluruh kader baik itu perempuan maupun laki-laki mengenai bagaimana terjun ke masyarakat, lalu bagaimana cara bertarung di lapangan itu seperti apa, dan sebagainya”¹³⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh dua orang kader perempuan Partai Gerindra sebagai berikut :

“Menjelang pemilu diberikan pembekalan oleh partai, karena sekarang masih tahapan awal pemilu 2024 ya masih belum”¹³⁶

“Kalau di pemilihan ya paling bentuk dukungannya kami diberikan pembekalan, kebetulan tahun 2014 itu saya mencalonkan diri juga”¹³⁷

Bimbingan dan dukungan berupa pembekalan politik diberikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk membekali seluruh kader baik perempuan maupun laki-laki mengenai cara atau strategi yang dapat dijalankan ketika terjun ke masyarakat dan bertarung di lapangan. Melalui upaya tersebut, seluruh kader khususnya perempuan kader dapat lebih berdaya untuk bersaing dalam kontestasi politik.

5) Pemeliharaan

Pemberdayaan dalam pendekatan pemeliharaan dapat dilakukan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam politik selama ini belum berjalan secara seimbang. Hal ini dikarenakan masih minimnya perempuan yang aktif dan eksis dalam dunia politik. Maka dari itu, untuk memberdayakan perempuan di bidang politik diperlukan suatu upaya untuk menjaga

¹³⁵ Wawancara dengan RR. Ira Damayanti, S.H, M.Si. pada 20 Mei 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹³⁶ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

¹³⁷ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

eksistensi dan keaktifan perempuan khususnya perempuan kader dalam berpartisipasi di ranah politik. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melibatkan perempuan kader dalam setiap program dan kegiatan partai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Dengan terus memberikan kesempatan kepada mereka dalam setiap kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh partai. Dengan mereka diberikan kesempatan untuk tampil otomatis punya poin tersendiri ketika mereka mencalonkan diri sebagai caleg karena mereka sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi itu kan sudah menjadi modal sosial ya untuk mereka....seperti tadi saat rapat, kami InsyaAllah tanggal 5 Juni ada kegiatan deklarasi Pak Prabowo, kami dorong dari kader-kader kami yang perempuan untuk mengurus dan mengatur rencana kegiatan tersebut, hasilnya tadi untuk ketua panitianya Bu Roro, sekretarisnya Bu Nia dan bendaharannya Bu Yana”¹³⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang perempuan kader sebagai berikut:

“Partai sudah memberikan perhatian yang lebih juga kepada kami kader-kader perempuan misalnya kami selalu diundang dan diikutkan dalam setiap kegiatan partai maupaun kepanitiaan dan selalu diberikan dorongan oleh partai agar selalu aktif berkegiatan politik di partai”¹³⁹

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas, dapat dilihat bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk selalu melibatkan perempuan kadernya dalam setiap program dan kegiatan partai mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya tersebut dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar perempuan kader dapat terus aktif dan eksis dalam berkegiatan politik di partai maupun nantinya di ranah politik yang lebih luas. Selain itu dengan terus melibatkan perempuan kader dalam setiap program dan kegiatan partai diharapkan dapat menjadi modal sosial bagi mereka ketika mengikuti

¹³⁸ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹³⁹ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

ajang pemilihan umum. Dengan begitu perempuan kader dapat semakin berdaya dalam politik.

b. Perempuan Umum/Masyarakat

Pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilakukan kepada perempuan kader partai namun juga perempuan umum atau dari kalangan masyarakat. Perempuan umum atau dari kalangan masyarakat yang dimaksud adalah ibu-ibu rumah tangga dan anak muda perempuan baik yang telah bergabung sebagai kader PIRA maupun yang belum bergabung sebagai kader PIRA (umum). Pemberdayaan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat di bidang politik dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo melalui wadah organisasi sayap PIRA yakni Pengurus Cabang (PC) PIRA Kabupaten Sidoarjo. Sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, Pengurus Cabang (PC) PIRA Kabupaten Sidoarjo menerapkan lima pendekatan dalam upayanya memberdayakan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat, diantaranya yaitu :

1) Pemungkinan

Pemberdayaan dalam pendekatan pemungkinan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok lemah dan tidak berdaya dapat berkembang secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan penyadaran politik dan sosialisasi terkait PIRA. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

“Terlebih dahulu perempuan perlu diberikan istilahnya penyadaran dan pemahaman tentang politik itu sendiri karena kebanyakan perempuan itu belum paham tentang politik. Selama ini yang membuat perempuan kurang terlibat di politik itu kan

kurangnya pemahaman tentang politik itu sendiri dan belum sadar pentingnya kita sebagai perempuan turut serta di politik. Kami sampaikan bahwa politik itu kan ada dalam kehidupan sehari-hari kita, mana ada sih kegiatan atau suatu hal dalam kehidupan kita ini yang lepas dari politik, tidak ada, semua itu berkaitan dengan politik, oleh karena itu sebagai perempuan kita harus terlibat di dalamnya dan pintar dalam berpolitik. Politik itu kan bukan soal pemilu ae, tapi kan juga berbicara tentang melayani masyarakat, mengabdikan ke masyarakat. Jadi dengan paham tentang politik, minimal perempuan bisa pintar dalam memilih wakil rakyat yang dianggap benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi kita dan daerah kita ini, jangan sampai pertimbangan kita ketika memilih wakil rakyat yang akan menjabat selama lima tahun kedepan itu dari uang yang diberikan (money politic) jangan sampai, karena masa depan kita dipertaruhkan. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri yang betul-betul paham dan peduli persoalan tentang anak misalnya, ibu atau perempuan, keluarga, kesehatan, bahan pangan itu ya kita-kita ini perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki ada yang peduli tapi masih minim soalnya lebih banyak tentang infrastruktur dan yang diluar itu tadi biasanya, sehingga penting kita terlibat di politik. Penyadaran ini biasanya kami sampaikan saat sosialisasi tentang PIRA ke ibu-ibu dan kegiatan pendidikan politik”¹⁴⁰

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, dapat dipahami bahwa perempuan pada umumnya masih belum memiliki pemahaman mengenai politik termasuk kesadaran untuk terlibat dalam politik. Kondisi tersebut menyebabkan kebanyakan perempuan masih enggan untuk terlibat dalam dunia politik termasuk untuk mengembangkan potensinya di bidang politik. Oleh karena itu untuk memberdayakan perempuan di bidang politik yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang secara optimal di bidang politik, upaya awal yang dilakukan PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan penyadaran politik kepada perempuan umum atau dari kalangan masyarakat.

PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berupaya memberikan penyadaran kepada perempuan bahwa politik ada di setiap sendi kehidupan dan politik bukan hanya persoalan pemilu melainkan juga terkait pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu perempuan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

perlu untuk terlibat dalam dunia politik sebab hanya perempuan sendiri yang mengerti, memahami dan mampu memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan perempuan sadar mengenai politik dan pentingnya mereka terlibat di politik diharapkan mereka dapat tergerak dan termotivasi untuk memberdayakan diri dan potensinya di bidang politik.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PIRA Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang secara optimal di bidang politik adalah dengan melakukan sosialisasi terkait profil dan kegiatan PIRA. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

“Oleh karena itu, kami juga mengenalkan PIRA ke ibu-ibu sambil diberi itu tadi penyadaran dan pemahaman politik, kita ajak mereka ayolah kita perempuan atau emak-emak kalau kumpul itu jangan hanya arisan tok ngobrol tok, di PIRA ini banyak sekali kegiatannya, PIRA juga wadah untuk menampung semua aspirasi perempuan, jadi ayo kumpul di PIRA sambil ada politiknya, ayo sama-sama memikirkan kemajuan kita dan daerah kita ini, ben ora nang pawon ae mbak hidup e kita sebagai emak-emak. Nah untuk itu kami masuk kedalam kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di lingkungan terdekat, seperti dasawisma, pkk, arisan dan sebagainya untuk mengenalkan tentang PIRA dan yang paling utama kegiatan-kegiatan kami misalnya pelatihan untuk umkm, ada koperasi, ada bakti sosial, dan masih banyak lagi, tapi kami hanya sosialisasi ya, tidak ada paksaan karena kami berharap perempuan yang masuk di PIRA ini memang dari hatinya. Kami tugaskan kepada kader-kader kami yang ada di ranting utamanya untuk menjalankan program atau kegiatan tersebut, jadi ya dari mulut ke mulut sosialisasinya. Pokoknya ikut dulu kegiatan-kegiatan di PIRA mong ya memang kegiatan kami untuk mengangkat emak-emak, sambil kami sosialisasikan terus, dan syukur-syukur mau gabung juga. Ya dengan cara seperti ini ibu-ibu bisa kita ajak untuk mau mengembangkan diri bersama-sama di PIRA”¹⁴¹

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari kader PIRA sebagai berikut:

¹⁴¹ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

“Kami di kecamatan juga ada kegiatan masuk ke kegiatan-kegiatan perempuan di lingkungan sekitar seperti pkk atau arisan untuk mengenalkan PIRA dan kegiatan-kegiatan yang kita miliki kepada ibu-ibu”¹⁴²

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas, dapat dilihat bahwa untuk mensosialisasikan terkait profil dan kegiatannya, PC PIRA Kabupaten Sidoarjo melakukan pendekatan kepada kelompok perempuan di lingkungan terdekat dengan masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti arisan, pkk, dan dasawisma. Sosialisasi tersebut dijalankan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk menarik minat perempuan umum atau dari kalangan masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan PIRA termasuk bergabung dalam organisasi PIRA dan memberdayakan diri beserta potensinya di berbagai bidang khususnya bidang politik. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo meliputi program dan kegiatan pemberdayaan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Kami punya beberapa program, untuk politik kami intinya ya menjaring perempuan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke politik, untuk sosialnya, kami turun ke masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dari aduan RT RW maupun informasi dari kader kita di kecamatan atau desa misalnya di daerah ini ada masalah lalu kami turun, semacam bakti sosial, menindaklanjuti aduan-aduan dari masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, penelantaran anak, disabilitas, masalah BPJS, lalu untuk di bidang ekonomi itu UMKM, kami membina sekitar 200 pelaku umkm perempuan dan gojek-gojek perempuan, kami berikan bantuan modal melalui koperasi umkm yang juga kami biayai dan kami berikan pelatihan-pelatihan”¹⁴³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

¹⁴² Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹⁴³ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

“Kita ada program di bidang sosial seperti memberikan bantuan pada warga yang terkena bencana alam, kemarin itu kami salurkan bantuan untuk korban banjir di Malang dan Lumajang, lalu di pendidikan itu sebenarnya masuk ke sosial juga tapi fokusnya lebih ke soal pendidikannya seperti kami berikan bantuan buku tulis dan dana bantuan sekolah, lalu ekonomi itu UMKM, koperasi, kami juga menindaklanjuti aduan-aduan dari warga sekitar terutama yang terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika misalnya emak-emak yang tergabung disini ada yang punya masalah di keluarganya, bisa sharing disini untuk bersama-sama kita bantu penanganannya atau solusinya nanti seperti apa, sehingga emak-emak ini tidak merasa sendiri dan ada tempat untuk bisa diwaduli”¹⁴⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC PIRA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Gambar 4. 2
Program dan Kegiatan PC PIRA Kab. Sidoarjo



¹⁴⁴ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo



(Dari atas, kegiatan bakti sosial, kegiatan bazar atau pameran UMKM dan pendidikan politik, Sumber : Arsip PC PIRA Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas, dapat dipahami bahwa telah banyak program dan kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo di berbagai bidang. Program dan kegiatan pemberdayaan di bidang sosial berupa bakti sosial ke masyarakat terutama yang mengalami bencana alam, menyerap dan menindaklanjuti aduan atau aspirasi masyarakat seperti terkait masalah atau kasus kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, penelantaran anak, disabilitas, masalah BPJS, termasuk berdiskusi dan mendampingi perempuan-perempuan yang menghadapi masalah. Program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi berupa pelatihan UMKM, koperasi dan bantuan modal usaha. Untuk program dan kegiatan pemberdayaan di bidang politik berupa pendidikan politik untuk perempuan. Melalui program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberdayakan perempuan di berbagai bidang terutama di bidang politik.

2) Penguatan

Pemberdayaan dalam pendekatan penguatan dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya di dalam masyarakat yakni perempuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Untuk memperkuat pengetahuan dan

kemampuan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat di bidang politik, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pendidikan politik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Kami ada kegiatan meningkatkan kader di bidang politik yaitu pembelajaran atau pendidikan politik yang kami adakan setiap 3 bulan sekali, bentuk kegiatannya itu seperti pertemuan kader, kita berikan paparan politik tentang apa itu sebenarnya politik, pentingnya kita perempuan ini untuk terlibat di politik, nah minimal tau lah terkait hal-hal tersebut, termasuk ada diskusi seputar isu-isu sosial maupun politik yang ada di kabupaten kita ini, bagaimana pandangan-pandangan kader terkait hal tersebut. Kami juga ikutkan dan libatkan kader-kader kami dalam kegiatan-kegiatannya anggota-anggota legislatif seperti reses, sosialisasi ke dapil-dapil agar tahu ini loh kegiatan-kegiatan politik itu. Kemudian kami ikutkan dalam pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang diadakan oleh PIRA yang di provinsi, tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik kader-kader kami, yang paling penting juga agar perempuan-perempuan ini sadar dan melek politik sehingga nantinya mau terlibat di politik”¹⁴⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kader PIRA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk di politik praktisnya itu ada kegiatan pendidikan politik yang tujuannya agar politiknya perempuan-perempuan ini terarah intinya, biasanya yang dibahas itu seputar perkembangan politik terkini, apa yang harus kita lakukan, lalu bangsa ini nanti arahnya kemana, intinya ini bentuk kepedulian kita perempuan-perempuan di PIRA ini terhadap bangsa. Kami juga diikutkan dalam kegiatan dimana kita ini dikumpulkan se-Jawa Timur dan diberikan pelatihan kepemimpinan disitu agar perempuan-perempuan berpolitiknya lebih terarah intinya. Kami biasanya juga ikut dalam kegiatan-kegiatannya anggota legislatif kita seperti reses, sosialisasi dapil dan sebagainya. Dalam setiap pertemuan atau kegiatan termasuk di momen pendidikan politik itu kami selalu sampaikan bahwa sebagai perempuan kita juga perlu turut terlibat di ranah politik atau publik, ya karena kita sebagai perempuan itu luar biasa loh dan kita perempuan ini mampu berperan di

¹⁴⁵ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

berbagai bidang baik itu di lingkup terkecil keluarga kita maupun masyarakat”¹⁴⁶

“Kegiatan pendidikan politik, ada pengarahan dari PIRA Kabupaten mengenai politik itu seperti apa, visi misi PIRA, arah bangsa mau dibawa kemana nantinya, intinya agar perempuan-perempuan ini melek terhadap politik, termasuk di tingkat kecamatan juga ada. Untuk yang dari Kabupaten itu tadi biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali, kalau di kecamatan itu sekitar sebulan sekali. Kami di PIRA kecamatan selalu diikutkan dalam kegiatan anggota dewan seperti sosialisasi-sosialisasi dan reses”¹⁴⁷

Berdasarkan pernyataan ketiga informan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo. Pertama, kegiatan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan kader yang diisi dengan pemaparan materi seputar politik dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik serta profil PIRA. Selain pemaparan politik dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi antar kader membahas mengenai isu-isu sosial dan politik terkini khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta pandangan-pandangan kader terkait isu-isu tersebut. Kegiatan ini dijalankan setiap 3 bulan sekali di tingkat Kabupaten dan 1 bulan sekali di tingkat kecamatan. Kedua yaitu kegiatan pendidikan politik dalam bentuk mengikutsertakan kader dalam kegiatan-kegiatan politik para anggota legislatif partai seperti reses dan sosialisasi ke beberapa dapil. Ketiga yaitu kegiatan pendidikan politik dalam bentuk mengikutsertakan perwakilan kader dalam kegiatan diklat (pendidikan dan pelatihan politik) khusus perempuan yang diadakan oleh pengurus PIRA di tingkat provinsi yakni Pengurus Daerah (PD) PIRA Jawa Timur.

Pendidikan politik menjadi suatu upaya yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan umum atau dari kalangan masyarakat di bidang politik sebab mereka pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terkait

¹⁴⁶ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹⁴⁷ Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

politik termasuk kesadaran mengenai pentingnya mereka untuk turut serta dalam dunia politik. Hal inilah yang menyebabkan perempuan beserta kepentingan-kepentingannya selama ini seringkali terabaikan dan termarginalkan dalam politik sehingga pada akhirnya berdampak pada ketidakberdayaan mereka di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu dengan diberikan pendidikan politik diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik perempuan umum atau dari kalangan masyarakat sehingga dalam prosesnya nanti mereka dapat tertarik untuk terlibat dalam dunia politik.

3) Perlindungan

Pemberdayaan dalam pendekatan perlindungan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok yang lemah dan tidak berdaya yakni perempuan khususnya dalam politik. Ranah politik hingga saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam politik. Maka dari itu untuk menjadikan perempuan berdaya dalam politik perlu dilakukan suatu upaya untuk memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dan dominasi di bidang politik. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah berkoordinasi dengan internal partai terkait pemenuhan keterwakilan perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Terkait itu, intinya kami sebagai organisasi sayap ya terus berkoordinasi dengan pihak partai melalui bidang pemberdayaan perempuan yang ada di internal partai untuk memastikan kuota 30 persen terpenuhi utamanya memang pada pemilu termasuk juga di kepengurusan misalnya. Karena kami ini sebagai organisasi sayap partai kan istilahnya menjadi wadah untuk menjangkau dan menyediakan perempuan-perempuan yang nantinya masuk ke politik, intinya kan begitu. Makanya kami terus berkoordinasi dengan partai agar keterwakilan perempuan bisa diperhatikan. Saya rasa Gerindra sudah sadar betul pentingnya perempuan di politik apalagi di legislatif dan bagaimana peran serta kontribusi

kami perempuan-perempuan melalui wadah PIRA ini kepada partai selama ini termasuk saat pemilu. Perempuan itu penentu kemenangan partai bahkan disini disebut sebagai ujung tombak partai, sehingga sudah seharusnya keterwakilan perempuan diperhatikan. Kami selalu sampaikan juga agar siapapun perempuan yang diajukan oleh partai itu harus yang benar-bener berkualitas dan kita semua tahu bagaimana misalnya loyalitas, keaktifan dan kontribusinya selama ini ke masyarakat utamanya ke partai juga, sehingga tidak asal comot saja perempuan-perempuan itu untuk sekedar memenuhi persyaratan pemilu, jangan sampai. Di Gerindra itu untuk diajukan sebagai caleg utamanya itu melalui proses seleksi, jadi nanti ada tim dari partai yang turun ke lapangan untuk ngecek langsung ke lingkungan rumah calon itu biar tahu bagaimana selama ini di masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap calon tersebut, sehingga benar-benar dilihat dari kualitasnya. Jika yang ditampilkan oleh partai itu perempuan-perempuan yang berkualitas tentunya berdampak positif bagi kami perempuan ini dan tentu bagi partai. Pandangan kalau perempuan itu nggak punya kemampuan kan jadinya bisa hilang, dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap perempuan di politik dan terhadap partai bisa naik”¹⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, dapat dilihat bahwa upaya koordinasi dengan pihak partai terkait pemenuhan keterwakilan perempuan dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo melalui bidang pemberdayaan perempuan yang ada di struktur internal partai. Upaya koordinasi tersebut dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan baik di internal partai maupun di dalam pemilu. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk mendorong partai agar dalam pengajuan perempuan sebagai calon anggota legislatif mempertimbangkan dari sisi kualitasnya sehingga perempuan yang dimajukan oleh partai dalam pemilu tidak sekedar dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilu. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu memberdayakan perempuan di bidang politik yakni memastikan agar perempuan baik itu perempuan umum atau dari kalangan masyarakat terutama yang telah menjadi kader PIRA maupun perempuan kader partai tidak mengalami diskriminasi dan dominasi yang dapat merugikan mereka dalam politik.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

4) Penyokongan

Pemberdayaan dalam pendekatan penyokongan dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar kelompok lemah dan tidak berdaya seperti perempuan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya khususnya di bidang politik. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan usulan terkait kandidat perempuan kepada internal partai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

“Terkait dukungan secara praktis, kami bisa memberikan usulan ke partai terkait perempuan-perempuan kami mana saja yang potensial untuk dapat dicalonkan dalam pemilihan. Sifatnya usulan saja, tentu usulan tersebut juga telah melalui seleksi dan penilaian seperti bagaimana selama ini mengikuti kegiatan, kemampuannya, loyalitasnya, kiprahnya di masyarakat, sehingga benar-benar perempuan yang kami usulkan tersebut memang layak dan siap untuk dicalonkan dalam pemilihan atau bisa juga naik ke kepengurusan di partai, sehingga sekali lagi tidak asal comot saja. Intinya perempuan-perempuan disini yang memang berpotensi atau potensial itu tadi kami dorong supaya tidak hanya aktif disini, harapan kami bisa aktif juga di luar PIRA ini misalnya ya di kepengurusan internal kalo memang belum masuk kesana dan juga di pemilihan. Jadi tidak hanya berkegiatan disini saja”¹⁴⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kader PIRA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“PIRA ini bisa memberikan semacam usulan mana saja dari perempuan atau emak-emak ini yang memiliki potensi untuk dimajukan dalam pemilihan dan tentunya harus ditempa dulu melalui pendidikan politik itu tadi, sehingga tidak semudah itu atau asal punya uang begitu, sehingga harapannya ya agar yang diusulkan itu tadi ketika ditampilkan benar-benar paham apa yang harus dilakukan dan mau mendengarkan keluhan rakyat”¹⁵⁰

“Kalau arahnya ke politik di PIRA ini juga bisa ngusulin untuk teman-teman perempuan mana saja yang bisa dimajukan dalam

¹⁴⁹ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

¹⁵⁰ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

pemilihan, bisa juga yang belum ikut ke partainya bisa nanti masuk kesana”¹⁵¹

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan diatas, dapat dipahami bahwa dukungan politik yang diberikan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo untuk perempuan umum atau dari kalangan masyarakat berupa pemberian usulan terkait kandidat perempuan potensial kepada internal partai. Dukungan tersebut diberikan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk mendorong perempuan-perempuan umum atau dari kalangan masyarakat khususnya yang memiliki potensi agar tidak hanya aktif di lingkup organisasi sayap namun di ranah yang lebih luas seperti dalam kepengurusan di internal partai maupun ajang pemilihan umum. Dukungan tersebut memungkinkan bagi perempuan umum atau dari kalangan masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya di ranah politik. Selain itu, melalui upaya tersebut juga dapat semakin memperkuat partisipasi dan keterwakilan perempuan di internal partai dan pemilihan umum.

Hal tersebut juga didukung dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis terhadap dokumen AD/ART Partai Pasal 25 Ayat 3 yang menerangkan bahwasannya organisasi sayap pada Partai Gerindra disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan. Berdasarkan studi dokumen tersebut, dapat dipahami bahwa dukungan dalam bentuk pemberian usulan terkait kandidat perempuan potensial kepada internal partai khususnya dalam kepengurusan internal menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap organisasi sayap di Partai Gerindra termasuk dalam hal ini PIRA sebagai organisasi sayap perempuan partai.¹⁵²

¹⁵¹ Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹⁵² AD/ART Partai Gerindra Pasal 25 Ayat 3 yang berbunyi : “Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan”

5) Pemeliharaan

Pemberdayaan dalam pendekatan pemeliharaan dapat dilakukan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam politik selama ini belum berjalan secara seimbang. Hal ini dikarenakan masih minimnya perempuan yang aktif dan eksis dalam dunia politik. Maka dari itu, untuk memberdayakan perempuan di bidang politik diperlukan suatu upaya untuk menjaga eksistensi dan keaktifan perempuan dalam berpartisipasi di ranah politik. Berkaitan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

“Untuk menjaga sekaligus mendorong agar emak-emak ini bisa terus aktif dan eksis disini ya dengan cara menjalankan program dan kegiatan yang ada secara terus menerus dan rutin, sehingga harapan kami memang sebagai wadahnya perempuan, emak-emak ini bisa aktif dan eksis baik itu dalam berkegiatan politik di masyarakatnya maupun juga dalam peningkatan kesejahteraan ataupun ekonomi keluarga. Intinya eksis di berbagai bidang”¹⁵³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kader PIRA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Rutin mengadakan pertemuan dan kegiatan seperti kegiatan ke masyarakat, kegiatan berbagi sembako, pelatihan di bidang ekonomi, ada juga arisan anjangsana, ya melalui kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya menjadikan kita semua emak-emak ini bisa terus aktif berkegiatan”¹⁵⁴

“Menurut saya ya dengan terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, sudah berjalan selama ini dan dilakukan juga secara rutin, terutama kegiatan-kegiatan yang memungkinkan teman-teman perempuan ini untuk maju atau tampil seperti bakti sosial ke masyarakat, pengajian, dan beberapa kegiatan lainnya.

¹⁵³ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

¹⁵⁴ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

*Semakin rutin dan banyak kegiatan atau pertemuan tentu semakin aktif dan bisa terus eksis teman-teman perempuan ini*¹⁵⁵

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan diatas, dapat dilihat bahwa PC PIRA Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu. Upaya tersebut dijalankan dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan yakni menjaga dan mendorong keaktifan serta eksistensi perempuan umum atau dari kalangan masyarakat dalam berpartisipasi di ranah publik atau politik.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Selain itu, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjalankan upaya pemberdayaan terhadap perempuan di bidang politik kepada 2 elemen yaitu perempuan kader partai dan perempuan umum atau masyarakat. Pemberdayaan terhadap perempuan umum atau masyarakat di bidang politik secara khusus dilakukan melalui wadah organisasi sayap perempuan yakni PIRA.

Tabel 4. 6
Upaya Pemberdayaan Perempuan di DPC Partai Gerindra
Kabupaten Sidoarjo

Elemen	Teori Pemberdayaan 5P	Upaya Pemberdayaan
Perempuan kader partai	Pemungkinan	a. Mengimplementasikan kebijakan afirmatif b. Membentuk bidang dan organisasi sayap khusus perempuan c. Menjalankan kaderisasi
	Penguatan	a. Memberikan pendidikan politik

¹⁵⁵ Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

	Perlindungan	a. Menempatkan perempuan kader pada jabatan strategis
	Penyokongan	a. Memberikan dorongan dan arahan b. Memberikan pembekalan politik
	Pemeliharaan	a. Melibatkan perempuan dalam setiap program dan kegiatan partai
Perempuan umum/ masyarakat	Pemungkinan	a. Memberikan penyadaran politik dan sosialisasi terkait PIRA
	Penguatan	a. Memberikan pendidikan politik
	Perlindungan	a. Berkoordinasi dengan internal partai terkait pemenuhan keterwakilan perempuan
	Penyokongan	a. Memberikan usulan terkait kandidat perempuan kepada internal partai
	Pemeliharaan	a. Menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu

Sumber : Hasil penelitian diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat dan diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh partai politik khususnya dalam hal ini DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan perempuan di bidang politik. Namun jika dianalisis lebih dalam menggunakan sudut pandang teori perempuan dan partai politik yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto dalam bukunya, *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*, maka dapat ditemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik termasuk dalam hal ini DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sebenarnya cenderung masih “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Hal ini dapat dianalisis setidaknya melalui 3 aspek seperti yang dijelaskan oleh Ani Widyani Soetjipto, yaitu (1) tidak adanya kebijakan pengarusutamaan

gender atau responsif gender dalam partai politik, (2) penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepengurusan partai, (3) berkaitan dengan departemen perempuan dalam partai politik.

Aspek pertama yakni tidak adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam partai politik. Pada aspek ini, partai politik secara umum tidak memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan keadilan gender yang tercantum dalam dokumen formal atau AD/ART. Dalam AD/ART seluruh partai politik yang ada, tidak satu pun yang mencantumkan ketentuan tentang hak dan kesempatan perempuan. Tidak dicantumkannya hak dan kesempatan bagi perempuan secara eksplisit dalam berbagai aturan pokok partai menjadi salah satu alasan yang memungkinkan keterpinggiran peran perempuan dalam partai.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebenarnya telah memiliki kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART nya. Hal ini dapat dilihat di dalam AD/ART Partai Gerindra Pasal 7 ayat 4, Pasal 8 ayat 4, Pasal 9 ayat 4, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 4 mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat (DPP), provinsi (DPD), kabupaten/kota (DPC), kecamatan (PAC) hingga desa/kelurahan (Ranting). Meskipun upaya ini menunjukkan langkah yang baik dimana telah tercantum kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART Partai Gerindra, namun upaya ini sesungguhnya masih sebatas mengadopsi dari undang-undang yang telah ada yakni Undang-Undang Partai Politik dimana memang mengharuskan setiap partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam komposisi kepengurusan partai baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 5: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan” dan Pasal 20: “Kepengurusan

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widayani Soetjipto, dimana belum ditemukan adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART partai selain berkaitan dengan pasal-pasal yang telah disebutkan tadi, memperlihatkan bahwa upaya partai politik sampai saat ini masih “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Hal ini sangat disayangkan sebab sejak adanya Undang-Undang Partai Politik hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya-upaya strategis lainnya yang dilakukan oleh partai politik yakni Partai Gerindra atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam hal menghadirkan kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART partai untuk memajukan peran perempuan di politik terutama dalam partai politik. Oleh karena itu, partai politik perlu menyusun regulasi teknis internal terinci yang menjadi indikator strategi partai untuk implementasi kebijakan afirmasi. Partai politik perlu menguraikan dalam kebijakan internalnya, misalnya dalam AD/ART, strategi yang akan digunakan untuk mencapai kesetaraan.¹⁵⁷

Aspek yang kedua yaitu penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepengurusan partai. Pada aspek ini, secara umum persentase pengurus perempuan dalam partai politik mengalami kenaikan, tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan mayoritas perempuan yang tidak menduduki posisi strategis. Hal tersebut juga dapat dilihat pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, dimana berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen terhadap susunan pengurus partai terdapat 13 orang perempuan dalam struktur kepengurusan dimana 1 orang perempuan pada posisi bedahara partai, 1 orang perempuan pada posisi wakil sekretaris partai dan 11 orang perempuan pada posisi ketua bidang atau divisi. Berdasarkan data tersebut, telah banyak posisi yang ditempati oleh perempuan dalam struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra

partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.

¹⁵⁷ Cakra Wikara Indonesia, *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*, *op.cit*, hal. 23

Kabupaten Sidoarjo dan posisi-posisi tersebut sebenarnya memungkinkan untuk perempuan dapat turut mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Namun posisi-posisi yang ditempati oleh perempuan tersebut dalam praktiknya belum mampu menjadikan perempuan sebagai penentu atau pengambil keputusan dalam partai politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kader perempuan berikut ini :

“...disini (Gerindra) itu intinya jika berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh partai, penentu utamanya itu KSB yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi untuk keputusan akhirnya yang menentukan KSB ini”¹⁵⁸

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, maka dapat dipahami bahwa ketua atau elit partai politik atau dalam Partai Gerindra disebut KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) masih mendominasi dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut tentu akan menutup ruang keterlibatan perempuan lebih jauh dalam kerja-kerja partai kecuali memiliki kedekatan dengan ketua atau elit partai politik. Dengan begitu, hanya terdapat 1 orang perempuan saja pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yakni bendahara partai yang benar-benar memiliki posisi strategis sebagai penentu keputusan atau kebijakan partai. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widyani Soetjipto, dimana meski jumlah kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai mengalami peningkatan secara teratur, tetapi representasi politik perempuan dalam kepengurusan parpol tidak secara otomatis menguat karena posisi-posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim diisi oleh perempuan. Realitas tersebut semakin menguatkan bahwa upaya partai politik sampai saat ini masih “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik.

Aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan departemen perempuan dalam partai politik. Partai politik secara tradisional mengorganisasikan kader-kader perempuan dalam departemen perempuan yang sering

¹⁵⁸ Wawancara dengan Novita Indriani pada 17 Juni 2022 di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

digunakan hanya untuk mendukung kebijakan partai dan bertugas untuk pengumpul suara bagi partai politik dalam pemilu. Tugas yang dijalankan lebih banyak pada peran-peran tradisional yang sering dikaitkan dengan peran perempuan dibandingkan untuk memajukan peran perempuan di politik termasuk dalam partai politik. Isu gender masih dianggap sebagai urusan perempuan semata dan diberikan sepenuhnya oleh partai politik kepada departemen perempuan untuk mengurusnya. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan, bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi sayap khusus perempuan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yaitu PIRA (Perempuan Indonesia Raya) sebenarnya telah menjalankan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam memajukan peran perempuan di politik seperti menjadi wadah untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan perempuan di internal partai, menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput dalam berbagai bidang termasuk bidang politik dan menjalankan berbagai kegiatan seperti koordinasi terkait pemenuhan keterwakilan perempuan serta pemberian usulan terkait kandidat perempuan potensial kepada internal partai yang dapat memperkuat perempuan di internal partai maupun dalam pemilu.

Namun sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ani Widayani Soetjipto bahwa partai politik termasuk dalam hal ini DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo cenderung menyerahkan urusan dan isu-isu perempuan sepenuhnya kepada departemen perempuan untuk mengurusnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya dukungan dalam bentuk program, kegiatan ataupun pendanaan yang diberikan oleh partai kepada bidang pemberdayaan perempuan dan khususnya organisasi sayap perempuan dalam rangka memajukan peran perempuan di politik. Upaya untuk memberdayakan dan memajukan peran perempuan di politik khususnya dalam partai politik seharusnya tidak begitu saja berhenti dengan membentuk bidang dan organisasi sayap perempuan, namun harus disertai dengan upaya-upaya keberlanjutan yang dilakukan oleh partai politik agar keberadaan bidang dan organisasi sayap perempuan dapat

lebih optimal untuk memajukan peran perempuan di politik. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal atau “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan perempuan di bidang politik. Namun, dalam realitas dilapangan ditemukan adanya faktor penghambat yang menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat tersebut berasal dari dalam diri perempuan (internal) maupun luar diri perempuan (eksternal). Selain itu, temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor yang menghambat upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik pada DPC Partai Gerindra terhadap perempuan kader tidak jauh berbeda dengan faktor yang menghambat upaya pemberdayaan terhadap perempuan umum atau dari kalangan masyarakat.

a. Faktor Internal

1) Peran Domestik

Faktor utama yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari sisi internal perempuan adalah peran domestik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris dan salah seorang kader perempuan Partai Gerindra berikut ini:

“...Perempuan itu kan punya tanggung jawab dirumah ya, jadi harus diakui tidak seeluasa laki-laki untuk beraktifitas di luar lah istilahnya apalagi di politik. Partai kan juga selama ini rapat

sering sampai malam atau kadang selama sehari-hari, jadi itu memang menjadi hambatan dari kader-kader perempuan kami”¹⁵⁹

“Hambatan utamanya lebih ke kami perempuan ini kan kurang memiliki keluasaan waktu dibandingkan laki-laki. Misalnya kan ada beberapa kegiatan partai yang memang mengharuskan full sampai malam, namun kan kami tidak bisa sampai full seperti bapak-bapak, sehingga memang keterbatasan inilah yang menjadi kendala yang kami hadapi sebagai kader perempuan”¹⁶⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengurus dan Kader PIRA beserta salah satu Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

“Harus diakui kalau perempuan itu punya keterbatasan dalam hal waktu, karena emak-emak ini kan memiliki tugas di rumah atau keluarga baik sebagai ibu dan istri jadi itulah keterbatasannya, sehingga pasti punya batasan waktu kapan harus berkegiatan diluar kapan harus di keluarga”¹⁶¹

“Tugas kita sebagai perempuan di dalam rumah tangga atau keluarga itu memang masih membatasi gerak dan waktu kita untuk berkegiatan disini”¹⁶²

“...namanya berpolitik itu artinya kan kegiatan perempuan ini tidak hanya di keluarga namun juga di politik atau publik sehingga nantinya akan menjadi sangat sibuk, otomatis waktu bersama keluarga juga akan menjadi berkurang, oleh karena itu tidak banyak perempuan yang siap terjun di ranah politik, tentu hal ini menjadi tantangan yang sulit bagi perempuan apalagi yang sudah berkeluarga untuk bisa total berpolitik”

Berdasarkan pernyataan dari kelima informan tersebut dapat dipahami bahwa perempuan memiliki waktu yang terbatas untuk dapat beraktivitas di luar rumah atau ranah publik jika dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian peran gender, perempuan memiliki peran dan tanggung jawab utama di dalam rumah tangga atau domestik yakni mengurus anak dan suami, sehingga perempuan yang memutuskan untuk aktif dalam politik praktis secara otomatis akan memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu di ranah domestik maupun perempuan politik di ranah publik. Situasi tersebut

¹⁵⁹ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹⁶⁰ Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

¹⁶¹ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹⁶² Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

tidak dialami oleh kaum laki-laki sebab mereka tidak memiliki beban di ranah domestik. Hal inilah yang menyebabkan perempuan memiliki waktu yang lebih terbatas untuk dapat leluasa dalam mengembangkan dirinya di ranah politik dan aktif dalam berbagai kegiatan politik.

Selain itu kegiatan partai politik yang cenderung belum ramah terhadap perempuan dimana seringkali berlangsung hingga malam hari bahkan menyita waktu hingga sehari-hari menyebabkan perempuan seringkali mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara tugas rumah tangga dan tugasnya dalam berpolitik atau berpartai. Oleh karena itu, persoalan peran di ranah domestik menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk dapat memberdayakan dirinya secara maksimal di ranah politik.

Selain persoalan peran domestik, faktor yang menghambat maksimalnya waktu bagi perempuan untuk dapat memberdayakan dirinya secara maksimal di ranah politik terutama dalam partai politik adalah pekerjaan atau profesi lain yang dimiliki oleh perempuan kader. Hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dimana ditemukan bahwasannya mayoritas perempuan kader di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo merupakan pengusaha atau pelaku usaha, sehingga selain menjalankan aktivitas sebagai kader partai, perempuan kader juga disibukkan dengan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga lain yakni dalam hal bisnis atau usaha. Oleh karena itu, faktor tersebut tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu hambatan bagi perempuan untuk dapat memberdayakan dirinya secara maksimal di ranah politik khususnya dalam partai politik.

b. Faktor Eksternal

1) Budaya Patriarki

Salah satu faktor eksternal yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah budaya patriarki. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo:

“...kembali lagi memang saya akui masyarakat kita ini masih menganut ideologi patriarki. Kalau perempuan keluar untuk ikut pengajian itu boleh, tapi kalau bicara politik itu imagenya masih negatif”¹⁶³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) PIRA Sidoarjo sebagai berikut :

“Kedua, pandangan masyarakat terkait perempuan di politik. Saya kira sedikit banyaknya faktor ini masih menghambat optimalnya perempuan dalam beraktivitas dan mengembangkan dirinya di ranah politik”¹⁶⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap keterlibatan perempuan di dunia politik termasuk partai politik. Pandangan negatif tersebut berakar dari budaya patriarki yang sampai saat ini masih kental di dalam kehidupan masyarakat. Pada ranah politik, budaya patriarki membangun persepsi yang kemudian diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan tidak pantas, tidak layak dan tidak cocok untuk masuk ke dunia politik. Hal tersebut dikarenakan, dalam budaya patriarki perempuan dianggap lebih pantas berada di wilayah domestik. Selain itu, politik yang selalu diidentikkan dengan hal-hal yang bersifat maskulin (kotor, kejam, penuh pertarungan, licik, dan sebagainya) dianggap tidak cocok dengan perempuan yang identik dengan sifat feminim (lemah lembut, emosional, bergantung, dan sebagainya). Oleh karena itu, masyarakat kurang memberikan dukungan kepada perempuan yang terjun ke dalam dunia politik. Kondisi tersebut tentu menjadi hambatan dalam upaya memberdayakan perempuan di ranah politik termasuk partai politik.

2) Agama

Faktor eksternal yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo selanjutnya berkaitan dengan persoalan agama. Hal ini sebagaimana

¹⁶³ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹⁶⁴ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo:

“... sebagian masyarakat masih ada yang memiliki padangan bahwa dalam agama itu perempuan tidak boleh istilahnya menjadi pemimpin, mong masih ada laki-laki kenapa perempuan gitulah”¹⁶⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) PIRA Sidoarjo sebagai berikut :

“Lalu soal nilai agama itu tadi saya kira, sama seperti terkait pandangan masyarakat sedikit lebihnya masih cukup menjadi hambatan perempuan untuk leluasa dalam berpolitik apalagi di Kabupaten Sidoarjo ini yang masyarakatnya religius. Saya kira masih ada masyarakat yang memandang selama ada laki-laki yang mampu di politik, ya perempuan sebaiknya ya menjalankan kewajibannya atau kodratnya di keluarga saja”¹⁶⁶

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang cukup religius sampai saat ini masih memiliki pandangan bahwa dalam agama terdapat larangan bagi perempuan untuk menjalankan perannya di ranah publik khususnya politik dan menjadi seorang pemimpin (selama masih ada laki-laki yang mampu menjadi pemimpin). Pandangan tersebut pada dasarnya terbentuk dari budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya terinternalisasi pula pada pemahaman terhadap ajaran agama.¹⁶⁷ Hal tersebut kemudian berimbas pada kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama terkait keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan kepemimpinan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam khususnya merujuk pada QS. At-Taubah ayat 71 maka agama sejatinya memberikan posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat di berbagai

¹⁶⁵ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹⁶⁶ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

¹⁶⁷ Septi Gumindari, *Psikologi dan Kekuasaan : Studi Keterlibatan Perempuan Cirebon dalam Perspektif Psikologi Politik*, (Cirebon : CV. Zenius Publishing, 2020), hal. 48

bidang kehidupan bahkan diajurkan untuk saling bekerjasama.¹⁶⁸ Oleh karena itu persoalan agama yakni kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama menjadi hambatan dalam upaya memberdayakan perempuan di ranah politik termasuk partai politik.

3) Kurangnya Komitmen Partai dalam Pemberdayaan Perempuan

Kurangnya komitmen partai juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalnya pemberdayaan perempuan dalam partai politik termasuk di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Tokoh Perempuan Muslimat NU berikut ini:

“...masalahnya bagaimana kemampuan termasuk komitmen partai itu sendiri yang akan membantu mensupport perempuan itu bisa jadi atau berangkat, karena tidak cukup sesuatu itu hanya tertulis di aturan tapi harus juga dengan gerakan. Tidak semua partai memiliki kemampuan atau strategi finishing atau yang saya sebut eksekusi untuk menjadikan perempuan itu sampai benar-benar jadi. Untuk itu kemampuan atau strategi serta komitmen partai agar perempuan goal jadi sangat penting, kalau tidak ada itu ya tidak akan ada keterwakilan perempuan. Partai itu sangat kurang sekali dalam hal eksekusi untuk mengantarkan perempuan jadi, sangat kurang sekali, komitmen dan keberpihakan partai belum maksimal untuk perempuan. Komitmen dan keberpihakan partai mestinya ditambah untuk benar-benar mampu menjadikan perempuan lebih berdaya di politik”¹⁶⁹

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat dipahami bahwa partai politik pada umumnya kurang memiliki komitmen yang serius untuk memberdayakan perempuan di bidang politik terutama agar perempuan berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya keberpihakan dan strategi khusus dari partai politik untuk mendorong perempuan agar mampu berdaya di lembaga legislatif. Kurangnya komitmen partai

¹⁶⁸ St. Habibah, *op.cit*, hal.362

¹⁶⁹ Wawancara dengan Dr. Dwi Astutik , S.Ag, M.Si pada 16 Agustus 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

dalam memberdayakan perempuan salah satunya disebabkan oleh kondisi partai yang mana selama ini masih cenderung tertutup terhadap perempuan di politik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tokoh Perempuan Muslimat NU sebagai berikut:

“...Bisa juga karena partainya yang tertutup...partai tertutup yang saya maksud diawal itu begini, tidak semua pemimpin khususnya disini pemimpin partai itu terbuka, diharapkan kita ada pemimpin yang transformatif dan suportif, yang membantu anggotanya bisa naik gitu, roda organisasi partai itu akan berjalan ideal jika pemimpinnya benar-benar berkomitmen dan mendukung agar anggota-anggotanya bisa terangkat termasuk mengangkat nasib perempuan”¹⁷⁰

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas maka dapat dilihat bahwa kondisi partai yang cenderung tertutup adalah berkaitan dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh pimpinan partai terutama terhadap perempuan dalam partai politik. Realitas dimana masih minimnya perempuan yang duduk dalam jabatan atau posisi penentu kebijakan di partai dan ditempatkan pada nomor urut atas dalam daftar pencalonan anggota legislatif menunjukkan bahwa para pimpinan partai pada umumnya masih kurang membuka ruang sepenuhnya bagi keterlibatan perempuan di politik. Oleh karena itu, kurangnya komitmen partai menjadi salah satu faktor yang turut menghambat optimalnya pemberdayaan perempuan di ranah politik khususnya dalam partai politik.

Kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan salah satunya juga di sebabkan oleh belum sinergisnya partai politik yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa mitra strategis dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Salah satu mitra strategis tersebut adalah lembaga pendidikan seperti universitas yang mana dalam hal ini memiliki beragam konsep mengenai pemberdayaan termasuk pemberdayaan politik perempuan. Melalui hubungan

¹⁷⁰ Wawancara dengan Dr. Dwi Astutik , S.Ag, M.Si pada 16 Agustus 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

kerjasama antara partai politik dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang memiliki beragam konsep mengenai pemberdayaan politik perempuan diharapkan dapat membantu mengembangkan dan mendukung berbagai program dan kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik khususnya di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 2 yakni faktor penghambat yang berasal dari dalam diri perempuan (internal) dan faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan (eksternal). Faktor penghambat yang berasal dari dalam diri perempuan adalah peran domestik yang dimiliki oleh perempuan. Sedangkan, faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan adalah budaya patriarki, persoalan agama atau kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama, dan masih kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan.

Tabel 4. 7
Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan
di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Faktor Penghambat	Hambatan
Internal (dari dalam diri perempuan)	a. Peran domestik
Eksternal (dari luar diri perempuan)	a. Budaya patriarki
	b. Agama
	c. Kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan

Sumber : Hasil penelitian diolah oleh penulis

3. Strategi Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Berbagai faktor penghambat menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjalankan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun strategi yang dijalankan diantaranya :

a. Strategi Mengatasi Hambatan Internal

1) Memberikan Keleluasaan Waktu

Strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan yang berasal dari sisi internal perempuan yakni peran domestik adalah dengan memberikan keleluasaan waktu bagi perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo:

“Kami berikan untuk kader perempuan keleluasaan khusus untuk mengatur waktunya supaya tidak bersinggungan dengan waktu atau urusannya di dalam keluarga. Biasanya teman-teman perempuan tidak bisa ikut kegiatan sampai malam, tentu kami dari partai sangat memaklumi kondisi tersebut, yang penting kan mereka aktif, ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam keluarga”¹⁷¹

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari salah seorang kader perempuan Partai Gerindra berikut ini:

“Kami diberikan keleluasaan waktu oleh partai dalam arti kami tidak diharuskan ikut kegiatan partai itu sampai larut malam seperti itu, karena kan kami perempuan punya tugas di keluarga”¹⁷²

Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab di ranah domestik. Hal tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat terlibat secara penuh dalam berbagai kegiatan politik dan kepartaian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPC

¹⁷¹ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

¹⁷² Wawancara dengan Rochmania pada 20 Juni 2022 di Rumah Informan

Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo memberikan keleluasaan waktu khusus bagi perempuan kader untuk dapat mengatur sendiri waktunya dalam berkegiatan politik di partai. Contoh nyatanya adalah ketika terdapat kegiatan partai yang berlangsung hingga malam hari, maka partai memperbolehkan perempuan kadernya untuk tidak mengikuti kegiatan hingga selesai. Hal tersebut merupakan perlakuan khusus yang diberikan oleh partai kepada perempuan kadernya dengan tujuan agar mereka tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga.

Strategi yang dijalankan untuk mengatasi hambatan peran domestik pada perempuan umum atau dari kalangan masyarakat juga tidak jauh berbeda dengan perempuan kader partai. PIRA dalam hal ini memberikan keleluasaan kepada pengurus dan kadernya untuk mengadakan pertemuan dan kegiatan pada waktu-waktu yang memungkinkan mereka dapat hadir dan tidak disibukkan dengan urusan rumah tangga atau keluarga seperti pada hari kerja (sekitar hari Senin sampai Jumat). Hal ini dapat dilihat dari adanya diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para pengurus dan kader PIRA dalam menentukan waktu pelaksanaan pertemuan maupun kegiatan yang akan diadakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua dan Pengurus Pimpinan Cabang (PC) PIRA Sidoarjo :

“Untuk waktu tentu kami mengadakan pertemuan dan kegiatan di waktu-waktu yang tidak mengganggu kader kami untuk berkumpul dengan keluarganya, jadi kami mengadakan pertemuan dan kegiatan ini di hari dan jam kerja, antara hari senin sampai jumat dan itu sudah menjadi kesepakatan kami di PIRA”¹⁷³

“Kami juga selalu musyawarah dulu jika mau melakukan pertemuan, enaknya kapan, agar tidak bentrok dengan kegiatan di keluarga, sehingga ya bisa terlibat dan aktif semua emak-emak ini dalam setiap kegiatan atau pertemuan yang diadakan”¹⁷⁴

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari kader PIRA berikut ini:

¹⁷³ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Erna Kusumawati pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

“Kami disini fleksibel saja, kegiatan tetap rutin dilakukan namun untuk waktu bisa dibicarakan, didiskusikan lagi”¹⁷⁵

Strategi tersebut dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo maupun organisasi sayap PIRA dengan tujuan agar perempuan dapat lebih mudah untuk membagi waktu antara urusan rumah tangga dan aktivitasnya di ranah politik. Dengan begitu, mereka dapat tetap aktif dalam memberdayakan dirinya di ranah politik namun tidak meninggalkan peran dan tanggung jawabnya di ranah domestik.

b. Strategi Mengatasi Hambatan Eksternal

1) Mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan

Strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan yang berasal dari sisi eksternal perempuan yakni budaya patriarki dan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan ajaran agama adalah dengan mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dan Ketua PC PIRA Sidoarjo berikut ini:

“Dengan mendorong kader perempuan kami aktif dalam berbagai program dan kegiatan partai yang bersentuhan dengan masyarakat, termasuk di sayap partai khusus perempuan juga karena disana juga banyak sekali kegiatan ke masyarakat, nah ini yang memang kita dorong dan kita tampilkan ke masyarakat bahwa perempuan eksis di partai dan politik itu ada sisi positifnya tidak mulu negatifnya saja, sehingga itu memang pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat”¹⁷⁶

“Kami maksimalkan kegiatan-kegiatan sosial kami ke masyarakat dan umkm dengan harapan agar masyarakat bisa melihat istilahnya kiprah dan aktivitas perempuan di politik itu seperti ini loh, intinya kita berikan bukti atau aksi nyata kami ke masyarakat. Hampir sama juga intinya dengan yang masyarakat tadi, terkait persoalan agama itu ya melalui kegiatan-kegiatan kerohanian atau keagamaan, kami disini mengadakan kegiatan pengajian ibu-ibu,

¹⁷⁵ Wawancara dengan Anik Windiastri pada 3 Juni 2022 di Warung Kopi Janoko 2 Sidoarjo

¹⁷⁶ Wawancara dengan Moch. Sujayadi pada 20 Mei 2022 di Rumah Makan Kawi Sidoarjo

sholawatan sama jumat berkah jadi bagi-bagi makanan, ya tujuannya sama kami ingin buktikan bahwa perempuan mampu di politik ya lewat aksi nyata kami di PIRA ini”¹⁷⁷

Hadirnya budaya patriarki dan interpretasi yang kurang tepat terhadap ajaran agama dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan timbulnya persepsi negatif terkait keterlibatan perempuan dalam dunia politik dimana perempuan dianggap tidak layak dan tidak cocok untuk berada dalam dunia politik. Hal tersebut menjadi hambatan bagi upaya pemberdayaan perempuan di ranah politik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan baik yang diadakan oleh partai maupun organisasi sayap PIRA.

Strategi tersebut dijalankan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan melihat sendiri terkait aktivitas dan kiprah perempuan di publik atau politik. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran politik kepada masyarakat mengenai dampak positif dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik termasuk dalam partai politik dimana perempuan lebih memiliki perhatian pada agenda-agenda politik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, persepsi masyarakat yang selama ini cenderung negatif terhadap keterlibatan perempuan di politik dapat berubah dan pada akhirnya turut memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan di ranah politik.

2) Memberikan Pelatihan Negosiasi

Strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan yang berasal dari sisi eksternal perempuan yakni kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Tokoh Perempuan sebagai berikut :

¹⁷⁷ Wawancara dengan Mimik Idayana pada 25 Mei 2022 di Rumah Informan

“Untuk dari perempuannya juga harus berani menyampaikan kalau menurut saya, perempuan harus menyampaikan keinginannya, misalnya pak ketua saya bisa dipastikan jadi, itu seringkali tidak terinfo dan perempuan masih belum memiliki keberanian untuk menyampaikan hal tersebut ke partai. Ya kembali lagi karena kurangnya komitmen partai itu tadi untuk 30 pesen jadi dalam rangka mendorong agar perempuan lebih berdaya di politik, sehingga perempuan sendiri harus maju dan menantang. Perjuangan dalam memberdayakan perempuan selama ini dimana pemerintah sudah menyiapkan kebijakan kuota, maka perempuan sendiri juga harus menyuarakan di partainya masing-masing. Perempuan itu harus kompak dan berani mendesak partai, karena dalam hal suara banyaknya dari siapa ya dari perempuan, yang menggalang dukungan untuk partai siapa, saya yakin juga banyaknya dari perempuan. Nah itu strategi utamanya, perempuan harus punya kemampuan untuk bernegosiasi, karena kalau mendesak tapi tidak punya apa-apa yang bisa dinegosiasikan tidak bisa. Untuk itu dalam rangka memberdayakan perempuan di ranah politik perlu difasilitasi oleh partai dengan memberikan pelatihan politik bagi kader perempuan agar memiliki skill atau kemampuan negosiasi”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, dapat dipahami bahwa kondisi dimana partai kurang memiliki komitmen yang serius terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik, maka pada gilirannya perempuan dalam partai politik itu sendiri yang harus turut memperjuangkan hal tersebut. Sayangnya temuan dilapangan selama ini memperlihatkan bahwa perempuan kurang memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya kepada partai politik. Keberadaan bidang dan organisasi sayap khusus perempuan dalam partai politik seharusnya dapat menjadi sarana yang strategis untuk mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan baik dalam proses politik di internal partai maupun di dalam pemilu.¹⁷⁸

Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang dapat dijalankan oleh partai politik adalah dengan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan. Melalui strategi tersebut, diharapkan perempuan memiliki kemampuan untuk menegosiasikan agenda atau kepentingan-kepentingannya dengan pihak partai terutama pimpinan partai sehingga

¹⁷⁸ Hurriyah dan Delia Wildianti, *op.cit*, hal.300

mampu mendorong dan memperkuat komitmen partai terhadap pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menjalankan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi yang dijalankan oleh partai untuk mengatasi hambatan internal berupa peran domestik adalah dengan memberikan keleluasaan waktu kepada perempuan. Sedangkan strategi yang dijalankan oleh partai untuk mengatasi hambatan eksternal berupa budaya patriarki dan persoalan agama adalah dengan mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan dan hambatan eksternal berupa kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.

Tabel 4. 8
Strategi Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Perempuan
di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo

Faktor Penghambat	Hambatan	Strategi Mengatasi Hambatan
Internal	a. Peran domestik	a. Memberikan keleluasaan waktu
Eksternal	a. Budaya patriarki	a. Mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan
	b. Agama	
	c. Kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan	b. Memberikan pelatihan negosiasi

Sumber : Hasil penelitian diolah oleh penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian mengenai “Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo)” sebagai berikut :

1. Upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Upaya pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dijalankan kepada dua elemen yaitu perempuan kader partai dan perempuan umum atau masyarakat. Upaya pemberdayaan terhadap perempuan umum atau masyarakat dijalankan melalui wadah organisasi sayap perempuan partai yakni PIRA (Perempuan Indonesia Raya). Upaya pemberdayaan terhadap perempuan kader yaitu **Pemungkinan** dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif, membentuk bidang dan organisasi sayap khusus perempuan, dan menjalankan kaderisasi, **Penguatan** dengan memberikan pendidikan politik, **Perlindungan** dengan menempatkan perempuan kader pada jabatan strategis, **Penyokongan** dengan memberikan dorongan dan arahan serta pembekalan politik, **Pemeliharaan** dengan melibatkan perempuan dalam setiap program dan kegiatan partai. Sedangkan upaya pemberdayaan terhadap perempuan umum atau masyarakat yaitu **Pemungkinan** dengan memberikan penyadaran politik dan sosialisasi terkait PIRA, **Penguatan** dengan memberikan pendidikan politik, **Perlindungan** dengan berkoordinasi dengan internal partai terkait pemenuhan keterwakilan perempuan, **Penyokongan** dengan memberikan usulan terkait kandidat perempuan kepada internal partai, dan **Pemeliharaan** dengan menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan kontinu. Selain itu, upaya-upaya pemberdayaan

perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo cenderung masih belum maksimal atau “separuh hati” dalam memajukan peran perempuan di politik. Hal tersebut dapat dilihat melalui 3 aspek seperti yang dikemukakan oleh Ani Widayanti Soetjipto yaitu (1) belum adanya kebijakan pengarusutamaan gender atau responsif gender dalam AD/ART Partai Gerindra selain yang berkaitan dengan pemenuhan kuota keterwakilan dalam struktur kepengurusan, (2) penempatan perempuan pada posisi-posisi yang tidak strategis dalam struktur kepengurusan partai, dan (3) belum adanya dukungan dalam bentuk program, kegiatan atau pendanaan yang diberikan oleh partai kepada bidang pemberdayaan perempuan dan khususnya organisasi sayap perempuan dalam rangka memajukan peran perempuan di politik.

2. Terdapat 2 faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam partai politik di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yakni faktor penghambat yang berasal dari dalam diri perempuan (internal) dan faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan (eksternal). Faktor penghambat yang berasal dari dalam diri perempuan adalah peran domestik yang dimiliki oleh perempuan. Sedangkan, faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan adalah budaya patriarki, persoalan agama atau kesalahpahaman masyarakat dalam menginterpretasikan ajaran agama, dan masih kurangnya komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan.
3. Terdapat 2 strategi yang dijalankan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan dalam partai politik yakni strategi untuk mengatasi hambatan internal dan hambatan eksternal. Strategi yang dijalankan untuk mengatasi hambatan internal berupa peran domestik adalah dengan memberikan keleluasaan waktu kepada perempuan. Sedangkan strategi yang dijalankan untuk mengatasi hambatan eksternal berupa budaya patriarki dan persoalan agama adalah dengan mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan dan hambatan eksternal berupa kurangnya

komitmen partai dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
 - a. Diharapkan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun program kerja, kegiatan maupun kebijakan internal yang secara spesifik terkait pemberdayaan untuk perempuan di bidang politik sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara maksimal.
 - b. Diharapkan terdapat kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan politik untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas perempuan di bidang politik.
 - c. Diharapkan terdapat upaya dan strategi khusus yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo agar perempuan lebih berdaya untuk dapat berpartisipasi di lembaga legislatif.
2. Bagi Perempuan
 - a. Perempuan diharapkan dapat terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran, wawasan dan kapasitas di bidang politik sehingga mampu berdaya dalam dunia politik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh partai politik maupun melalui wadah organisasi sayap perempuan partai sehingga dapat semakin memperkaya dan memperkuat data hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra
Manifesto Perjuangan Partai Gerindra
- Abubakar, Rifa'I. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amirullah. 2016. Pendidikan Politik Perempuan. *Jurnal Visipena Volume 7 Nomor 1*.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metode Penelitian Untuk Public Relations. Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arka, I Ketut. 2021. Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No. 3*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2022. *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2022*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Ballington, Julie. 2011. *Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat*. United Nations Development Programme dan National Democratic Institute.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cakra Wikara Indonesia. 2018. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Depok : Cakra Wikara Indonesia.
- Cakra Wikara Indonesia. 2021. *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*. Jakarta : Cakra Wikara Indonesia.
- Gumiandari, Septi. 2020. *Psikologi dan Kekuasaan : Studi Keterlibatan Perempuan Cirebon dalam Perspektif Psikologi Politik*. Cirebon : CV. Zenius Publishing.
- Habibah, St. 2015. Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik. *Jurnal Al-Maiyyah Volume 8 No.2*.
- Hilda, Jein, dkk. 2018. Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1*.

- Hurriyah dan Wildianti, Delia. 2020. *Partisipasi tanpa Representasi : Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia. Prosiding Simposium Hukum Tata Negara : Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Pontianak : Alfabeta.
- Ilyas, Rifa Ufariah. 2016. *Peran Lembaga Flower Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Banda Aceh Pasca Konflik*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Komariyah, Nur. 2017. *Gerakan Perempuan Partai Politik (Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan Oleh Perempuan Bangsa Di Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.
- Kurnia, Jajang. 2011. *Peran Pimpinan Pusat Aisyah Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Kurniawan, Nalom. 2014. *Keterwakilan Perempuan Didewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*. *Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 4*.
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, Citra Restu. 2018. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung : UNPAD Press.
- Mulyono, Ignatius. 2010. *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. Makalah yang disampaikan dalam diskusi panel peluang untuk keterwakilan perempuan. (2 Februari 2010).

- Nurman. 2017. Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan. *Journal of Moral and Civic Education*, 1 (2).
- Oktapiani, Komang Eva, dkk. 2020. Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat, PSI). *Jurnal Ilmu Politik Vol. 1 No.1*.
- Ramadhani, Rizki Krizma Cahya. 2021. Pelaksanaan Kaderisasi Perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 8 Edisi II*.
- Ratu, Syahita Tri. 2021. *Strategi Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepala Utara) Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Lampung Utara*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.
- Saputra, Komara. 2020. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.
- Sitorus, Candra. 2015. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies, Vol. 4, No.3*.
- Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Buku Kompas.
- Suciptaningsih, Oktaviani Adhi. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Komunitas 2 (2)*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. 2020. Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Kajian Vol.25 No.1*.
- Wahyudi, Very. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam Vol. 1 No 1*.

Cakra Wikara Indonesia. Dinamika Keterwakilan Perempuan Di Parlemen : Membaca Data Dan Proyeksi Ke Depan Dalam Rapat Umum Kaukus Perempuan Parlemen RI pada 17 Februari 2020. <http://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/02/PPT-CWI-KPP-RI-17-Feb-2020.pdf>. (10 Oktober 2021).

Hidayah, Siti Nurul. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>. (7 Oktober 2021).

<https://kpud-sidoarjo.go.id/pages/calon-terpilih-hasil-pemilu-pilkada-kpu-sidoarjo>. (11 Oktober 2020).

<http://partaigerindra.or.id/>. (10 Oktober 2021)

<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>. (diakses pada 15 April 2022 pukul 22.00)

<https://pira.or.id/>. (diakses pada 15 April 2022 pukul 10.00)

<https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1294504/sidoarjo-jadi-daerah-dengan-kekerasan-seksual-tertinggi-di-jatim>. (diakses pada 15 September 2022 pukul 09.00)

<https://cakrawikara.id/2021/02/diskusi-publik-menakar-peran-dan-posisi-strategis-perempuan-di-struktur-dpp-partai/>. (diakses pada 30 Desember 2022 pukul 20.00)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A